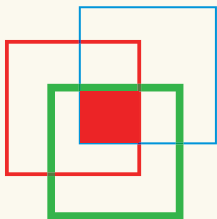


Organisasi
Perburuhan
Internasional

Program ILO di Indonesia: Capaian 2012



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Program ILO di Indonesia: Capaian 2012

Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2013
Cetakan Pertama 2013

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

Program ILO di Indonesia: Capaian 2012/Organisasi Perburuhan Internasional, Kantor Jakarta; ILO, 2013
66 p.

ISBN: 978-92-2-027422-4 (print)
978-92-2-027423-1 (web pdf)

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: *ILO Works in Indonesia: 2012 Results*; ISBN: 978-92-2-027422-4 (print); 978-92-2-027423-1 (web pdf)/Kantor Perburuhan Internasional - Jakarta: ILO, 2013

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Foto-foto: Koleksi Kantor ILO Jakarta

Dicetak di Indonesia

Kata Pengantar



ILO merupakan organisasi internasional yang bertanggungjawab merumuskan dan menetapkan standar-standar ketenagakerjaan internasional. Organisasi ini merupakan satu-satunya badan Persatuan Bangsa-Bangsa yang bersifat 'tripartit' di mana perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja bersama-sama menyusun kebijakan dan program untuk mempromosikan Pekerjaan Layak untuk semua. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong peluang pekerjaan yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan.

Di Indonesia, ILO telah mendukung pekerjaan layak selama beberapa dasawarsa, dengan pendirian kantor di Jakarta lebih dari 40 tahun yang lalu. Kegiatan yang dilakukan di negara ini dipandu Pemerintah Indonesia, konfederasi serikat pekerja dan Apindo sebagai perwakilan pengusaha. Tahun lalu, bersama-sama dengan para Konstituen ini kami merumuskan Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) yang kedua bagi Indonesia untuk periode 2012–2015. DWCP 2012–2015 ini menetapkan tiga prioritas berikut:

1. Penciptaan lapangan kerja;
2. Hubungan industrial; dan
3. Perlindungan sosial.

Saya dengan senang hati berbagi laporan capaian tahunan kami yang pertama melalui publikasi ini. Kendati kami telah mengomunikasikan capaian-capaian kerja kami melalui beragam cara dan bentuk, kilasan apa yang telah mampu kami capai dalam kurun waktu setahun belum terpublikasikan dengan baik. Dokumen ini menjawab kesenjangan itu.

Bersama dengan para Konstituen kami dan dengan dukungan yang besar dari para donor, kami terus berperan aktif mendukung Pemerintah Indonesia melalui pekerjaan layak untuk semua. Penting untuk tidak hanya mencatat segala kerja keras yang telah kami lakukan tapi juga melihat capaian-capaian dari upaya tersebut.

Kami akan terus mendukung Pemerintah Indonesia, konfederasi serikat pekerja dan Apindo di tahun-tahun mendatang. Tahun 2013 merupakan tahun yang penting bagi Indonesia, tidak hanya di tengah-tengah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah berikutnya tapi juga dengan peran internasional Indonesia dalam menyusun tujuan-tujuan pembangunan internasional setelah 2015.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para Konstituen kami atas kemitraan yang luar biasa pada 2012, para donor untuk kontribusi strategis mereka dan tentunya juga kepada kolega ILO di Indonesia dan lainnya untuk segala capaian yang telah dilakukan.



Peter van Rooij

Direktur ILO Jakarta

Pekerjaan Layak untuk Semua

Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak. Pekerjaan layak merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi masyarakat dalam kehidupan pekerjaan mereka. Ia melibatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga mereka.

Pekerjaan layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membutuhkan adanya kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua perempuan dan laki-laki. Pekerjaan layak pun merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Karenanya, penciptaan pekerjaan layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan.

Daftar Isi



Kata Pengantar	3
-----------------------	----------

Daftar Isi	5
-------------------	----------



Sekilas Indonesia

A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan	12
--	-----------

1. Kebijakan ketenagakerjaan	
♦ Memantau dan Menilai Kemajuan Pekerjaan Layak (MAP)	13
♦ Mengkaji dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE)	14
2. Ketenagakerjaan Muda	16
3. Pengoptimalan ketenagakerjaan dalam investasi masyarakat	
♦ Akses ke Mata Pencarian Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim (GLACIER)	18
♦ Penciptaan Lapangan Kerja: Peningkatan Kapasitas untuk Pembangunan Jalan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Terpilih di Aceh dan Nias	20
♦ Proyek Akses Perdesaan dan Peningkatan Kapasitas di Kepulauan Nias (NIAS-RACBP)	22
4. Pengembangan kewirausahaan dan bisnis	
♦ Program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)	25
♦ Pengembangan Koperasi	28
♦ Inklusi Finansial	31
♦ Fase II Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PcDP)	34
♦ Program Pemulihan Mata Pencarian di Kepulauan Mentawai	36
♦ Mencapai Standar Kehidupan Minimum untuk Masyarakat yang Kurang Beruntung melalui Perdamaian dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa (Proyek Pelagandong)	39
♦ Green Jobs di Asia	42

B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif	
--	--

♦ Better Work Indonesia	45
♦ Hubungan Industrial	48

C. Perlindungan sosial untuk semua

1. Perlindungan Sosial untuk Semua	51
2. Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia)	54
3. Program Pekerja Anak	56
4. Melindungi Pekerja Migran Indonesia	58
5. Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja	60

Tema lintas sektor

1. Kesetaraan Gender	
♦ Akses terhadap Pekerjaan dan Pekerjaan Layak Bagi Perempuan (MAMPU)	63



Bagaimana ILO Bekerja

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 185 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Dalam mengundang pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program, ILO ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini didasari pada kebutuhan para perempuan dan laki-laki yang bekerja.

ILO bekerja berdasarkan pedoman dari Badan Pemimpin ILO (Governing Body), yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pekerja/buruh dan 14 wakil pengusaha. Mereka bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan anggaran, yang kemudian diserahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) untuk disetujui, serta memilih Direktur Jenderal.

ILC mengadakan pertemuan setiap bulan Juni tiap tahunnya di Jenewa. Para delegasi didampingi oleh para penasihat teknis. Setiap negara anggota, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk mengirimkan empat delegasi ke ILC – dua dari pemerintah dan masing-masing satu mewakili pekerja dan pengusaha. Mereka dapat mengemukakan pendapat dan melakukan pemungutan suara secara mandiri.

ILO di Indonesia: Prioritas dan Keluaran

Indonesia dan ILO telah menjalin kerja sama sejak Indonesia menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. Menerapkan struktur tripartit yang unik, ILO membangun kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan tiga konfederasi serikat pekerja: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Berdasarkan prioritas-prioritas Pemerintah Indonesia, mandat ILO dan fokus para konstituen tripartit, tiga bidang prioritas telah ditetapkan untuk Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2012-2015:

A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.

B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.

C. Jaminan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.

Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripartisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diurusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.



Sekilas Indonesia

POPULASI
237,641,326 orang
Perempuan: 49.66%
Laki-laki: 50.34%



AREA
Total Area: 1,904,589 km²
Pulau: 13,487
Kepadatan: 124 org/km²



PEMERINTAHAN
Provinsi: 33
Daerah Khusus: 3
Kabupaten/Kota: 399



171.210

Penduduk yang bekerja (dalam 000)

118.385

Penduduk aktif secara ekonomi

(dalam 000)

110.476

Total ketenagakerjaan (dalam 000)

7,909

Total pengangguran (dalam 000)

74.335

Total pekerja mandiri (dalam 000)

Statistik Utama (2011)

69,15%

Tingkat partisipasi angkatan kerja

64,53%

Rasio tenaga kerja atas penduduk

67,29%

Jumlah pekerja mandiri dalam ketenagakerjaan

13,24%

Tingkat setengah pengangguran

6,68%

Tingkat pengangguran

4,62%

Rasio pengangguran atas penduduk

30,85%

Tingkat ketidakaktifan

Sumber ILO KILM (Key Indicator Labour Market)

PROYEK:



Kebijakan tentang Ketenagakerjaan Muda dan Program untuk Lebih Mempersiapkan Kaum Muda Menghadapi Transisi dari Sekolah ke Pekerjaan dan Memasuki Dunia Kerja



Mempromosikan Usaha Mikro dan Kecil melalui Peningkatan Akses Pengusaha ke Layanan Keuangan (PROMISE IMPACTS)



Akses terhadap Pekerjaan dan Pekerjaan Layak Bagi Perempuan (MAMPU)



Program Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil di Asia Tenggara



Green Jobs di Asia



Fase II Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PeDP) Pelembagaan Pembangunan Mata Pencarian yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Papua



Program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)



Better Work Indonesia



Proyek Akses Perdesaan dan Peningkatan Kapasitas di Kepulauan Nias (NIAS-RACBP)



Program Pemulihan Mata Pencarian di Kepulauan Mentawai



Program Pekerja Anak



Mengkaji dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE)



Mencapai Standar Kehidupan Minimum untuk Masyarakat yang Kurang Beruntung melalui Perdamaian dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa (Proyek Pelagandong)



Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia)



Akses ke Mata Pencarian Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim (GLACIER)



Memantau dan Menilai Kemajuan Pekerjaan Layak (MAP)



Proyek ILO untuk Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan terhadap Pekerja Migran Indonesia



Aksi Tripartit ILO untuk melindungi Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek Triangle, Indonesia)



Penciptaan Lapangan Kerja: Peningkatan Kapasitas untuk Pembangunan Jalan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Terpilis di Aceh dan Nias

PROGRAM:



Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja



Hubungan Industrial



Perlindungan Sosial untuk Semua

Kegiatan



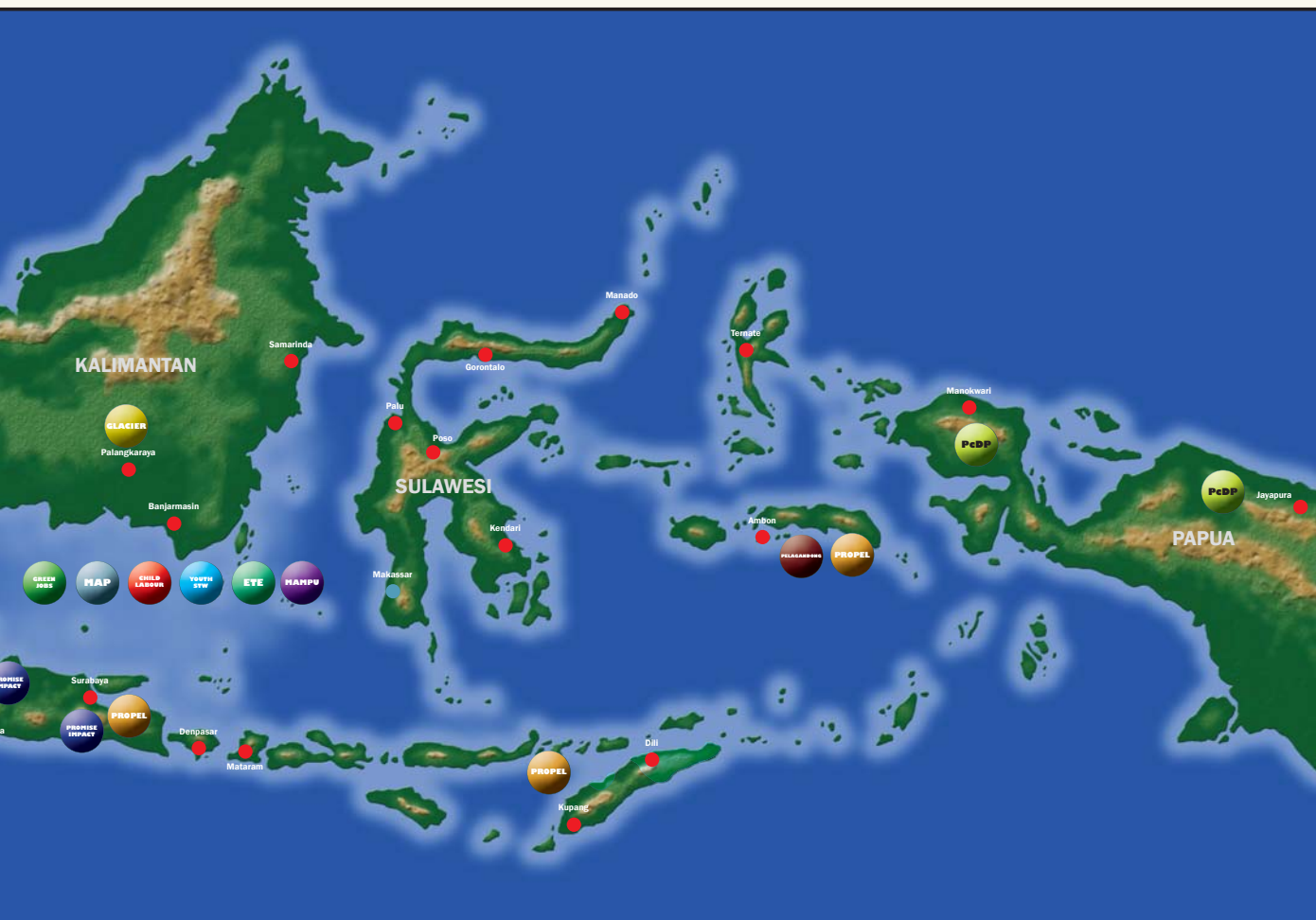
Didukung oleh:



Komisi Eropa



Antan ILO di Indonesia



**International
Finance Corporation**
World Bank Group



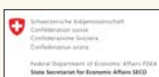
Irish Aid
Department of Foreign Affairs
An Roinn Cosúlachtaí Éireannacha



Norad



Sida



A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.



Memantau dan Menilai Kemajuan Pekerjaan Layak (MAP)



Sekilas:

Didanai Uni Eropa, Proyek MAP ILO dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Indonesia dan mitra sosialnya. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja serta beberapa lembaga penelitian, Proyek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas negara berkembang dan sedang menjalani transisi untuk memantau dan menilai sendiri kemajuan pekerjaan layak. Indonesia merupakan satu dari 10 negara di dunia yang melaksanakan Proyek MAP.

Didukung oleh:



• • Capaian Tahun 2012:

1. **Penyelesaian Profil Pekerjaan Layak untuk Indonesia** yang mencakup kemajuan yang dicapai Indonesia dari tahun 1996 sampai 2010, mengidentifikasi tantangan yang ada serta mengembangkan kebijakan untuk mencapai Agenda Pekerjaan yang Layak. Profil ini mencakup beragam perkembangan yang terjadi pasar kerja Indonesia baru-baru ini, dari tingkat partisipasi angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan hingga jam kerja dan upah yang mereka terima. Profil ini pun mencatat kemajuan yang dilakukan untuk mengurangi pekerja anak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperluas hak untuk berserikat dan perundingan bersama.
2. **Penyelesaian rancangan akhir Profil Indikator Pekerjaan Layak untuk Maluku** sebagai salah satu provinsi sasaran dalam melaksanakan Program Pekerjaan Layak Nasional di Indonesia.

Target Tahun 2013:

1. Melanjutkan pengumpulan data dan penyelesaian profil provinsi terkait Indikator Pekerjaan Layak untuk Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur sebagai tiga provinsi sasaran dalam pelaksanaan Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia, di samping Maluku.
2. Melanjutkan pengumpulan data dan penyelesaian Profil Indikator Pekerjaan Layak secara Sektoral di tingkat nasional untuk melaksanakan Program Pekerjaan Layak Nasional di Indonesia.

Mengkaji dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE)



Sekilas:

Proyek ETE didasari pada mandat khusus ILO sesuai Deklarasi Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil (2008) serta upaya ILO mempromosikan Agenda Pekerjaan Layak, terutama tujuan strategis Agenda tersebut dalam menciptakan lapangan kerja serta mempromosikan dialog sosial. Proyek ETE, yang didanai Komisi Eropa, bertujuan untuk membantu analisis tentang kebijakan perdagangan dan pasar kerja yang efektif dan koheren guna mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi pekerja dan pengusaha serta memperluas kesempatan penciptaan pekerjaan layak di negara-negara berkembang. Di tingkat nasional, proyek ini bertujuan untuk menjalankan kegiatan awal pengembangan kapasitas para pembuat kebijakan, mitra sosial dan peneliti serta meningkatkan partisipasi mereka dalam dialog kebijakan.

Didukung oleh:



.. Capaian Tahun 2012:

1. **Penerbitan penelitian berjudul “Perdagangan di Bidang Jasa dan Ketenagakerjaan: Kasus Indonesia” and penulisan Laporan Nasional.** Rancangan Laporan Nasional telah dikaji oleh para pemangku kepentingan terkait dan telah diakui Policy Working Group. Studi ini menemukan bahwa sektor jasa, yang banyak membantu perekonomian Indonesia selama masa pemulihan pasca Krisis Keuangan Asia, kini merupakan salah satu sektor terbesar – lebih besar dari kombinasi pertanian dan manufaktur. Dibandingkan dengan pertanian dan manufaktur, industri jasa mempekerjakan lebih banyak pekerja kerah putih, di sektor formal dan pekerja berpendidikan.

2. **Pembentukan Policy Working Group untuk memfasilitasi dialog kebijakan.** Kelompok ini berhasil menjadi forum untuk membangun konsensus tentang penanganan masalah pasar kerja dan perdagangan, membahas berbagai permasalahan penting terkait kebijakan pasar kerja dan perdagangan yang koheren serta mengidentifikasi bidang-bidang prioritas, dan membantu penyusunan rekomendasi kebijakan.

3. **Penyelesaian laporan analisis simulasi Perjanjian Perdagangan Bebas** antara Indonesia-Cina, Indonesia-India dan Indonesia-Australia.

Target Tahun 2013:

1. Laporan Nasional yang dilengkapi dengan kontribusi para konstituen akan diselesaikan pada kwartal pertama tahun 2013 dan diluncurkan secara nasional.



Ketenagakerjaan Muda



Sekilas:

Kaum muda Indonesia saat ini jauh lebih berpendidikan dibandingkan sebelumnya. Namun, kendati mengenyam pendidikan yang lebih baik, mereka masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Statistik memperlihatkan kemungkinan kaum muda Indonesia menganggur lima kali lebih besar dibandingkan orang dewasa. Mengingat jumlah kaum muda akan mencapai titik tertinggi pada satu dasawarsa mendatang, diperlukan adanya kebijakan dan program yang mendorong penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda. Selama 10 tahun terakhir, ILO dan mitranya telah bekerja sama dalam mempersiapkan kaum muda Indonesia memasuki dunia kerja serta mempromosikan ketenagakerjaan muda melalui berbagai inisiatif yang difokuskan pada akses ke pekerjaan layak, pelatihan kerja dan kewirausahaan, pelatihan keterampilan serta mempromosikan hak-hak pekerja. ILO juga telah mengidentifikasi sejumlah metode praktis untuk mempersiapkan kaum muda Indonesia memasuki dunia kerja dengan melibatkan pelatih, pembimbing dan fasilitator, mentransformasikan metode pelatihan dan pengajaran serta memberi inspirasi kepada ribuan orang muda untuk membangun usaha.

Didukung oleh:



.. Capaian Tahun 2012:

1. **Melanjutkan dukungan terhadap Pemerintah Indonesia melalui berbagai program untuk mempersiapkan kaum muda secara lebih baik dalam menjalani transisi dari sekolah ke dunia kerja dan saat memasuki dunia kerja.**

Didanai Pemerintah Swedia (SIDA), program ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan program yang mempengaruhi ketenagakerjaan muda di tingkat nasional guna menyediakan pondasi terhadap rencana nasional dan pengembangan program terkait kewirausahaan, magang serta pelatihan dan pengembangan keterampilan. Proyek ini pun akan menyusun satu rencana nasional tentang ketenagakerjaan muda yang diintegrasikan ke dalam Strategi Penciptaan Lapangan Kerja, mendukung Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia (IYEN) melalui peningkatan kapasitas, mempromosikan ketenagakerjaan muda serta

mengadakan Forum ASEAN tentang Ketenagakerjaan Muda bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. **Pengembangan jaringan dan berbagi pengetahuan tentang ketenagakerjaan muda dan tantangan global melalui Aspirasi Kaum Muda (Voices of Youth),** sebuah kegiatan berbagi pengetahuan yang diadakan di 50 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Aspirasi Kaum Muda ini mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mempromosikan pekerjaan layak bagi kaum muda, menciptakan sinergi antar negara dan meningkatkan visibilitas global upaya memperbaiki situasi kerja bagi kaum muda. Rekomendasi-rekomendasi dari kegiatan ini dipaparkan dalam sidang ke-101 Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) yang diadakan di Jenewa pada Juni 2012.

Target Tahun 2013:

1. Melaksanakan proyek Ketenagakerjaan Muda.

Kisah Sukses: Mewakili Indonesia dalam forum global

Rendy Maulana merupakan seorang pengusaha muda berusia 24 tahun yang mewakili Indonesia dalam Forum Global tentang Ketenagakerjaan Muda yang diadakan ILO di kantor pusatnya di Jenewa pada 23-25 Mei 2012. Forum ini menghadirkan lebih dari 100 orang muda dari seluruh dunia untuk berdiskusi mengenai krisis pekerjaan dunia serta tantangan utama yang dihadapi kaum muda dalam memperoleh pekerjaan layak.

Maulana memulai usaha *web-hosting* (PT Qwords Company International) di Kota Bandung saat baru menginjak usia 18 tahun. Ide dasar dari usahanya ini adalah menyediakan situs dengan harga terjangkau bagi masyarakat untuk memasarkan bisnis mereka. Maulana mengaku tidak pernah menerima pelatihan kewirausahaan tapi mempelajari bidang manajemen pemasaran di bangku kuliah.

Delapan belas bulan setelah Maulana membuka usahanya, ia mulai merekrut karyawan dan bahkan saat ini telah mempekerjakan delapan karyawan agar dapat beroperasi 24 jam. Kini perusahaannya termasuk salah satu dari 10 perusahaan *web-hosting* terkemuka di Indonesia. Maulana membantu banyak orang memasarkan bisnis mereka secara online agar terus berkembang dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Sekarang ia sedang membangun usahanya di Singapura sebagai upaya memperluas jangkauan usahanya ke kawasan Asia-Pasifik. Ia pun seorang pembimbing di Creative Cultural Entrepreneurship sebagai bagian dari program pasca sarjana administrasi (MBA).

Akses ke Mata Pencaharian Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap Perubahan Iklim (GLACIER)



Sekilas:

Mengingat pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan instruksi untuk menghentikan kegiatan pembukaan hutan adat dari tahun 2011 hingga 2013 dan instruksi (No. 2 Tahun 2007) yang mewajibkan rehabilitasi dan pelestarian Kawasan Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut (Eks PLG) di Kalimantan Tengah. Sejalan dengan Rencana Eks PLG, ILO Indonesia melalui UNDP, dengan anggaran dari Pemerintah Norwegia, melaksanakan proyek percontohan selama 12 bulan guna meningkatkan akses ke mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan Eks PLG Kalimantan Tengah. Proyek akan memperkenalkan pendekatan partisipatif berbasis sumber daya lokal dan membangun kapasitas lokal guna merehabilitasi kawasan hutan yang terdegradasi, mempromosikan pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan serta meningkatkan akses ke pasar dan fasilitas sosial ekonomi.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2012:

1. **Peningkatan kapasitas Gugus Tugas Nasional REDD+ di bawah naungan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)** dengan menyediakan pelatihan bagi seorang anggota staf dalam Green Jobs Learning Forum yang diadakan Pusat Pelatihan Internasional ILO di Turin. Tujuannya untuk memberikan masukan yang lebih baik dalam merancang pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*) melalui strategi nasional REDD+ di masa mendatang serta menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan Gugus Tugas REDD+ / UKP4.



2. **Peningkatan kapasitas bagi lima pemangku kepentingan lokal mengenai Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat** dengan melibatkan mereka dalam lokakarya nasional tentang masyarakat adat yang diadakan di Jakarta pada November 2012. Lokakarya ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip utama Konvensi ILO No. 169 serta kaitannya dengan program pembangunan yang terkait dengan hak masyarakat adat.

3. **Sosialisasi tujuan dan strategi Proyek Glacier sebagai upaya membangun sinergi dan komitmen dari penerima**

manfaat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di tiga kabupaten dengan melibatkan 43 pemangku kepentingan utama dari lembaga pemerintah, pemerintah desa, hingga organisasi masyarakat adat, dan LSM lokal.

4. **Penerapan program perencanaan partisipatif bersama masyarakat setempat di lima daerah sasaran** untuk mengidentifikasi intervensi potensial sesuai kebutuhan aktual di kawasan proyek. Daftar prioritas potensial telah dikumpulkan dan diserahkan ke ILO untuk dianalisis lebih lanjut. Perhatian khusus diberikan pada keterlibatan perempuan dalam kegiatan ini.

Target Tahun 2013:

1. Merehabilitasi 100 hektar lahan yang terdegradasi di kawasan proyek.
2. Membangun kolam pencegah kebakaran seluas 200 meter.
3. Membangun satu kanal kecil.
4. Meningkatkan pengetahuan mengenai investasi di lima masyarakat sasaran untuk meningkatkan dan memelihara akses atas sumber daya alam.
5. Menyediakan pelatihan bagi sekitar 300 penerima manfaat (laki-laki dan perempuan) tentang kewirausahaan dan keterampilan sesuai permintaan pasar.

Penciptaan Lapangan Kerja: Peningkatan Kapasitas untuk Pembangunan Jalan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Terpilih di Aceh dan Nias



Sekilas:

Proyek yang didanai Multi Donor untuk Aceh dan Sumatera Utara (MDFANS) ini bertujuan untuk membantu pemulihan dan pembangunan kembali Aceh dan Nias dengan memadukan kegiatan peningkatan kapasitas dengan pembangunan jalan di sejumlah kabupaten. Tujuan khusus proyek ini adalah memperbaiki jaringan jalan, mendorong ketenagakerjaan lokal, membantu kegiatan pemulihan ekonomi serta membangun kapasitas lembaga dan teknis pihak-pihak terkait. Kegiatan ini mencakup kontraktor lokal dan staf mereka, pegawai kantor pemerintah daerah, pegawai Program Pembangunan Kecamatan (KDP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta masyarakat setempat.

Proyek ini dikembangkan melalui lima tahap yaitu dari Tahap Percontohan setelah terjadi tsunami (tahun 2005 hingga kwartal pertama tahun 2006); Tahap I (Maret 2006 hingga Maret 2008); Tahap II (Oktober 2008 hingga September 2010); Tahap II Perpanjangan (Oktober 2010 hingga Agustus 2011); dan Tahap III (Desember 2011 hingga November 2012).

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2012:

Pencapaian Umum

1. **Penggunaan jasa kontraktor lokal untuk melaksanakan kegiatan.** Hasil penelitian dampak memperlihatkan para kontraktor lokal memiliki keterampilan manajemen dan finansial yang lebih baik setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan Proyek ini.
2. **Penerapan sistem perawatan jalan berbasis komunitas secara rutin** yang efektif biaya dengan prosedur estimasi kegiatan perawatan yang sederhana dan praktis.
3. **Perbaikan akses dan jaringan jalan serta pembangunan ekonomi lokal di daerah-daerah** melalui perbaikan jalan, pengurangan biaya transportasi dan peningkatan keuntungan, pengurangan jarak tempuh serta akses yang lebih baik ke prasarana sosial dan ekonomi.
4. **Rehabilitasi jalan dan fasilitas irigasi bermutu tinggi dan efektif biaya** di tingkat kabupaten dan masyarakat yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan pendistribusian penghasilan.
5. **Pengembangan sarana dan sistem untuk membantu pemerintah daerah di Kabupaten Pidie dan Bireuen** dalam merencanakan, memprioritaskan serta menyusun anggaran investasi di bidang pembangunan jalan (Sistem Informasi Pengelolaan Jalan/SIPJ3),

GIS jalan, rencana induk lima tahun dan panduan perawatan jalan berbasis masyarakat secara rutin).

6. **Peraturan Bupati Bireuen No. 17 Tahun 2012 tentang Perawatan Rutin Jalan Berbasis Masyarakat** serta dua petunjuk pelaksanaannya: No. 366 Tahun 2012 tentang Inklusi Jalan Kabupaten dan Kecamatan dan No. 367 Tahun 2012 tentang Tugas Utama Kantor Kabupaten terkait tentang Pelaksanaan Perawatan Rutin Jalan Berbasis Masyarakat telah dikeluarkan.
7. **Mempromosikan kesetaraan gender bagi perempuan dalam kegiatan konstruksi**, sehingga mengubah peran perempuan dalam konstruksi, terutama bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga.

Kegiatan Fisik

1. **Rehabilitasi jalan sepanjang 178,8 km dan perawatan jalan sepanjang 177,2 km**, yang melampaui target awal proyek ini.
2. **Pembangunan 10 unit jembatan dan penyeberangan sungai.**
3. **Rehabilitasi saluran irigasi sepanjang 0,84 km dan perawatan saluran irigasi sepanjang 2,18 km.**
4. **Pembangunan empat pintu irigasi dan rehabilitasi empat irigasi lainnya.**
5. **Penciptaan 387.698 hari kerja jangka pendek, yang merupakan pencapaian 83 persen target.**

Peningkatan Kapasitas

1. **Peningkatan kapasitas 400 orang staf kontraktor lokal di bidang manajemen dan keterampilan teknis pembangunan jalan menggunakan pendekatan Berbasis Sumber Daya Lokal (LRB).** Penelitian dampak yang diadakan menunjukkan bahwa semua kontraktor yang terlibat dalam proyek ini berhasil mendapatkan kontrak dari pemerintah/proyek lain dan terus melanjutkan kegiatannya setelah proyek ini berakhir.
2. **Pelatihan 156 orang pengawas jalan (28 perempuan) dan 530 anggota masyarakat (150 perempuan)** di Aceh dan Nias tentang kegiatan perawatan jalan secara rutin.
3. **Penyebarluasan semua buku panduan dan spesifikasi teknis dalam bahasa Indonesia** yang digunakan dalam kegiatan pembangunan/perawatan kepada semua Dinas Pekerjaan Umum dan dinas terkait lainnya.
4. **Perlindungan lingkungan** menggunakan teknologi pengerasan (*cold-mix*) aspal emulsi.
5. **Pengembangan pengelolaan pengetahuan dan dokumen** yang terkait dengan kegiatan konstruksi/ perawatan baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia.

Proyek Akses Perdesaan dan Peningkatan Kapasitas di Kepulauan Nias (NIAS-RACBP)



Sekilas:

Proyek ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan dalam membangun kembali prasarana penting setelah terjadi bencana di Aceh dan Nias. Tujuan menyeluruh dari Proyek ini adalah warga kabupaten yang berpartisipasi dapat menggunakan prasarana dan layanan transportasi desa yang lebih baik serta memperoleh manfaat dari akses yang lebih baik ke layanan dan fasilitas ekonomi sosial. Multi Donor untuk Aceh dan Sumatera Utara (MDFANS) mendanai dua proyek yang terkoordinir dan secara konsep saling terkait, namun terpisah secara administrasi, untuk kepulauan Nias. Proyek Nias RACBP ini dilaksanakan secara langsung oleh ILO sesuai Kesepakatan Badan Fiskal dengan Bank Dunia, yang merupakan kesepakatan terbesar hingga saat ini. Proyek Nias-RACBP difokuskan pada peningkatan jaringan transportasi desa yang strategis di tiga kluster ekonomi/pertanian di kepulauan Nias yang menjadi sasaran Nias-LEDP (Proyek Pembangunan Mata Pencaharian dan Ekonomi di Kepulauan Nias). Proyek Nias-RACBP dilaksanakan di 21 kecamatan yang memperluas kegiatan Nias-LEDP dengan mengatasi hambatan utama terhadap pembangunan ekonomi dan mata pencaharian, yaitu akses jalan dan jembatan yang buruk ke masyarakat terpencil.

Didukung oleh:



.. Capaian Tahun 2012:

Pencapaian keseluruhan

1. **Penyediaan sarana fisik transportasi desa yang bermutu tinggi dengan biaya yang efektif dalam waktu yang ditetapkan.** Proyek ini menggunakan teknologi berbasis tenaga kerja lokal dan pendekatan yang dipadu dengan peningkatan kapasitas sesuai permintaan dan kegiatan pelatihan selama siklus proyek yang terbukti efektif dengan biaya kompetitif.
2. **Promosi keterlibatan perempuan lokal dalam angkatan kerja** (partisipasi perempuan 30 persen). Sebagai perbandingan, di tahap awal, partisipasi pekerja perempuan hanya sekitar 7-15 persen.
3. **Peningkatan volume lalu lintas sebesar lebih dari 60 persen, penghematan biaya transportasi sebesar 20 persen dan penghematan waktu tempuh sebanyak 55 persen** bagi penduduk setempat serta akses yang lebih baik bagi para petani.
4. **Membantu efektivitas biaya dalam melestarikan aset yang sudah dibangun** melalui format yang sederhana dan praktis serta demonstrasi sistem perawatan berbasis masyarakat.

Pembangunan infrastruktur

1. **Penyelesaian pembangunan jalan “semua cuaca” sepanjang 68,6 km dan jalur motor, yang terdiri dari jalan sepanjang 21,4 km dan jalur motor sepanjang 47,2 km.** Jalan-jalan ini telah diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum atau otoritas Kecamatan.
2. **Pembangunan 73 jembatan dan penyeberangan sepanjang 1.942 meter dan perbaikan tujuh jembatan sepanjang 94 meter.** Jembatan ini sudah diserahkan ke pemerintah kabupaten setempat.
3. **Rehabilitasi dan penyerahan 140 rumah tradisional, satu balai pertemuan dan lima situs megalith** ke pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
4. **Pembangunan akses terpadu dan saluran pipa ke sumber mata air, reservoir/tangki dan pompa sudah mencapai 85 persen,** dan penyelesaiannya ditargetkan pada 31 Maret 2013. Pengoperasian akses terpadu ini akan melayani sekitar 10.000 penduduk yang tinggal di desa tradisional di Bawomataluo, Nias Selatan.

Peningkatan kapasitas

1. **Sebanyak 26.145 hari pelatihan telah dicapai** melalui beberapa pelatihan yang dilaksanakan di ruang kelas maupun melalui pelatihan kerja.
2. **Tenaga teknis lapangan atau “barefoot engineers” yang telah mengikuti pelatihan tentang pembangunan jalan dan jembatan** melalui pembelajaran dan pelatihan di ruang kelas selama enam bulan serta magang selama enam bulan untuk 42 remaja lokal di Kepulauan Nias, di mana 24 persen di antaranya adalah perempuan.
3. **Perencanaan replikasi inisiatif jembatan di empat kabupaten lain di Nias oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara.** Beberapa pemerintah daerah lain juga telah menyatakan minatnya, demikian pula halnya dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pembangunan Daerah Tetinggal serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Kisah Sukses: Jembatan Kebahagiaan Pak Guru Fatieli



Kebahagiaan yang terpancar di wajahnya sejak ILO membangun jembatan menyeberangi sungai Oyo, di Kecamatan Mandrehe Utara, Nias Barat, satu tahun yang lalu

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lahago ini menceritakan, dulu sebelum ada jembatan, masyarakat yang ingin mengambil hasil bumi mereka seperti pisang, daun ubi, kelapa, dan cokelat yang terletak di seberang desa harus menunggu sampai air surut ketika hujan turun. "Kami harus jalan cepat-cepat, takut ada luapan sungai. Kalau sudah sampai seberang dan air pasang, kami terpaksa tidur di kebun. Kadang-kadang kami sampai harus menunggu dua hari, baru bisa lewat lagi," kenang Fatieli.

Selain menjadi pegawai negeri sipil, penghidupan masyarakat di desa-desa sekitar sungai Oyo sangat tergantung pada hasil bumi, seperti pisang, kelapa, cokelat, dan karet. Fatieli sendiri punya kebun pisang, yang katanya tidak terlalu besar. "Lumayanlah hasilnya bisa untuk makan," ungkapnyanya tanpa mau memerinci hasil yang didapat dari kebun pisangnya. Sebagai gambaran, di beberapa daerah di Nias, harga satu tandan pisang jenis kepok, ambon raja, dan barangan di tingkat petani mencapai Rp. 8.000 – Rp. 9.000 per tandan.

"Jembatan ini adalah doa dari seluruh warga," kata Sonifati yang setiap hari melewati jembatan di Desa Oyo untuk mengajar di SDN Teraha yang berjarak satu kilometer.

"Kami sangat gembira karena ILO membangun jembatan ini. Dengan adanya jembatan ini, kami sangat bersemangat untuk mencari kehidupan. Kebun-kebun kami pun juga lebih terawat. Kini, kami telah benar-benar merdeka melewati sungai dan terbebas dari neraka kemiskinan," kata Fatieli. "Jembatan ini kini telah menjadi milik kami. Kami akan terus rawat walaupun ILO sudah selesai bekerja di sini."

Program Kesiambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)



Sekilas:

Diluncurkan pada Juli 2010, program ILO-SCORE dirancang untuk membantu usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia agar dapat meningkatkan mutu dan produktivitas, meningkatkan kondisi kerja, mengurangi dampak lingkungan serta memperkuat kerjasama dan komunikasi antara pengusaha dengan pekerja. Program ini membantu perusahaan agar lebih berdaya saing di pasar global sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan Badan Kerjasama Pembangunan Nowergia (NORAD), program SCORE ini didukung oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), konfederasi serikat pekerja nasional dan Yayasan Dharma Bhakti Astra. Indonesia terpilih sebagai salah satu dari tujuh negara di samping India, Cina, Afrika Selatan, Ghana, Vietnam, dan Kolombia untuk melaksanakan program SCORE.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2012:

1. **Penerapan Modul 1 SCORE tentang Kerjasama di Tempat Kerja di enam provinsi Indonesia:** Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Lampung.
2. **Penyelesaian pelatihan tentang pelatih utama (*master trainer*) SCORE di enam provinsi** yang mencakup 4 dari 5 modul pelatihan utama SCORE tentang kerjasama di tempat kerja, pengelolaan mutu, produktivitas dan produksi yang lebih bersih serta pengelolaan sumber daya manusia.
3. **Penerapan Modul Pelatihan 1 SCORE oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dengan mengadakan dan mendanai pelatihan SCORE di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung dan Kalimantan Timur.
4. **Penerapan modul pelatihan SCORE oleh Yayasan Dharma Bhakti Astra** sehingga secara tajam mengurangi kontribusi pelatihan ILO-SCORE menjadi 10 persen.
5. **Pembuatan basis data Evaluasi dan Pemantauan SCORE** dengan hasil sebagai berikut: 77 perusahaan terdaftar sebagai perusahaan percontohan SCORE; 76 pelatih telah mengikuti pelatihan; 378 manajer (48 persen) dan pekerja (52 persen) telah menerima pelatihan.
6. **Penyelesaian Kampanye Pemasaran Sosial SCORE di Jakarta dan Makassar** yang telah memperlihatkan peningkatan kesadaran pihak manajemen dan pekerja tentang praktik yang bertanggungjawab di tempat kerja dan tentang menjalin hubungan kerja serta komunikasi



Target Tahun 2013:

1. Mendukung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyuluhan SCORE di 15 provinsi lainnya.
2. Menjamin kelangsungan metodologi SCORE di Indonesia.
3. Meningkatkan kesadaran tentang praktik yang bertanggungjawab di tempat kerja di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kisah Sukses: Mendunia melalui Program ILO-SCORE

PT Mubarakfood Cipta Delicia di Kudus, Jawa Tengah, adalah salah satu perusahaan percontohan untuk program ILO-SCORE. Setelah bergabung dengan program ILO-SCORE pada 2011 lalu, perusahaan ini berhasil meningkatkan produktivitas, kondisi kerja serta komunikasi yang lebih baik antara manajemen dengan pekerja. Mubarakfood juga berhasil mengurangi jumlah produk cacat yang harus dikerjakan ulang. Di samping diberi penghargaan Parama Karya untuk Produktivitas dan Kualitas Nasional 2011, Mubarakfood juga diundang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memaparkan produktivitas dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam Pertemuan Asia Eropa tentang K3 yang diadakan di Singapura, 10 September 2012.

Dirintis dari bisnis rumahan yang sederhana lebih dari satu abad lalu, PT Mubarakfood Cipta Delicia berhasil berkembang menjadi produsen panganan terkenal, khususnya di Jawa Tengah. Perusahaan yang saat ini dikelola generasi ketiga keluarga yang merintis usaha, sekarang mempekerjakan lebih dari 100 orang pekerja dan produknya dijual ke seluruh Indonesia dan diekspor ke luar negeri.

Beberapa tindakan telah diambil untuk memperluas bisnis ini, termasuk dengan membeli sebidang lahan untuk membangun pabrik yang lebih besar dari pabrik sekarang di areal lahan seluas 1 hektare. Namun, sebelum melanjutkan rencana perluasannya,

perusahaan menyadari bahwa mereka perlu menyelesaikan beberapa masalah. "Kami merasa komitmen pekerja fluktuatif. Mereka kurang disiplin, hanya memperlihatkan upaya minimum, dengan tingkat absensi dan lembur yang tinggi," kata Presiden Direktur Muhammad Hilmy.

Pemakaian materi dan kayu bakar juga dianggap tidak efisien. Kayu bakar khususnya masih dianggap problematis. Karena lembap kayu bakar menyebabkan api tidak stabil, sehingga mengakibatkan kerja ekstra dan adonan kue menjadi gosong. Perusahaan ini juga menghadapi persaingan tidak sehat akibat pemalsuan yang merajalela. "Kami telah mengambil tindakan hukum terhadap seorang produsen, tapi produk palsu masih banyak beredar. Kami tidak dapat menuntut mereka semua," kata Ashifuddin, Manajer Produksi, sambil menunjukkan satu rak tinggi penuh dengan produk palsu.

Manajemen Mubarakfood memutuskan bahwa mereka butuh bimbingan dalam menghadapi masalah ini. Untungnya, mereka diperkenalkan oleh dinas tenaga kerja setempat dengan program ILO-SCORE pada Maret 2011, dan mereka pun memutuskan untuk segera berpartisipasi dalam program ini. "Ini seperti panggilan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah," kata Hilmy.

Perusahaan membentuk beberapa tim yang bertanggungjawab memelihara kebersihan dan kerapian pabrik. Pekerja berkumpul secara rutin untuk melakukan apel, mereka diberi motivasi

dan pengetahuan tentang kualitas kerja. Pemberian penghargaan dan hukuman diterapkan secara lebih ketat, di mana satu kesalahan akan diberi hukuman peringatan sedangkan pekerjaan yang baik akan diberi bonus.

Mekansime kendali mutu diterapkan di akhir setiap tahap produksi dan bukan di akhir keseluruhan proses agar lebih mudah melihat kesalahan. Gudang penyimpanan kayu bakar diperbaiki dan direnovasi. Atap asbes dan atap bocor diganti dengan atap fiberglas agar sinar matahari dapat masuk untuk mengeringkan kayu.

"Kerja sama tim dan koordinasi meningkat secara signifikan. Pekerja memastikan hasil pekerjaan terbaik dan kebersihan pabrik. Tingkat absensi menurun dan pekerja senang karena ada tempat untuk memberi masukan dan saran," kata Meilany Astining Asih, Kepala Bagian Personalia PT Mubarakfood Cipta Delicia.

Kini tiada lagi lagi masalah dengan kayu bakar. Dengan gudang yang sudah diperbarui, kayu menjadi kering dalam waktu satu sampai dua minggu, sehingga api lebih stabil dan mempercepat proses masak serta menghemat 22 persen uang lembur. Di samping itu, sejauh ini, belum ada produk yang ditolak atau harus dibuat ulang. Efisiensi produksi pun meningkat sehingga menghasilkan pengiriman barang yang lebih tinggi, dan jumlah pesanan yang lebih banyak.

Pengembangan Koperasi



Sekilas:

Koperasi membantu mengamankan mata pencaharian sekitar tiga milyar penduduk di seluruh dunia. Koperasi pun memiliki satu milyar anggota dan menyediakan lebih dari 100 juta lapangan kerja di seluruh dunia. ILO mempromosikan model usaha koperasi untuk menciptakan dan menjaga kelangsungan usaha. Koperasi menawarkan pekerjaan yang tidak saja memberikan penghasilan tapi juga membangun kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi para anggotanya, keluarga dan masyarakat, serta memungkinkan mereka yang memiliki keterampilan tapi memiliki sedikit ataupun tanpa modal untuk menciptakan pekerjaan dan membantu pengembangan ekonomi. Di Indonesia, gerakan koperasi memainkan peran penting sebagai salah satu organisasi masyarakat madani terbesar dan perusahaan sosial dengan potensi besar dalam pembangunan desa dan penciptaan lapangan kerja.

Capaian Tahun 2012:

1. **Adaptasi paket dan program pelatihan My.COOP tentang pengelolaan koperasi pertanian oleh Indonesia**, bekerja sama dengan Vredeseilanden Country Office (VECO), Indonesia Peasant Alliance (API), Agriterra dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). My.COOP Indonesia menargetkan dewan direksi koperasi, pengurus koperasi, koperasi petani organik (yang biasanya tidak memiliki struktur formal), pimpinan koperasi perempuan, ketua kelompok anggota, dan ketua koperasi kelompok.

2. **Kemitraan dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam program “Coops 4 Jobs” sebagai upaya merevitalisasi koperasi di Indonesia**. Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan kebijakan dan bantuan teknis dalam upaya memperbaiki kerangka kebijakan dan hukum koperasi, termasuk pengembangan

dan peningkatan koperasi primer dan sekunder di sektor pilihan yang dapat digunakan sebagai model replikasi lebih lanjut.

3. **Pelaksanaan serangkaian kegiatan sosialisasi Rekomendasi ILO No. 193 tentang Promosi Koperasi** sebagai upaya mempromosikan koperasi kepada para pemangku kepentingan ILO di Indonesia. Rekomendasi ini

mengakui pentingnya koperasi dalam menciptakan lapangan kerja, menggalang sumber daya, menghasilkan investasi dan membantu perekonomian. Rekomendasi ini juga memasukkan prinsip-prinsip koperasi sebagai panduan bagi koperasi dalam mempraktikkan nilai-nilainya.



Target Tahun 2013:

1. Pelaksanaan selanjutnya paket dan program pelatihan My.COOP bekerja sama dengan Kementerian Koperasi UKM dan VECO.
2. Terus menyosialisasikan Rekomendasi ILO No. 193 tentang Promosi Koperasi.
3. Kemungkinan pelaksanaan program “Coops 4 Jobs”.

Kisah Sukses:

Mengubah limbah menjadi bisnis yang menguntungkan

Di kota kecil berpenghasilan rendah, Toisapu, di Kepulauan Maluku, buah pala dulunya dianggap sebagai limbah. Warga desa setempat hanya memanfaatkan biji pala dan isinya, dan membuang buahnya.

Namun itu semua berubah pada 2010, saat "Koperasi Wanita Sejuk" muncul dengan ide memanfaatkan keseluruhan buah pala untuk menghasilkan jus pala. Pada awalnya, koperasi ini memproduksi sekitar 40 sampai 50 botol per bulan. Kini, produksinya meningkat hingga 2.400 botol per bulan dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat.

Hasilnya, perempuan yang terlibat dalam proyek ini kini dapat menikmati penghasilan dan kondisi hidup yang lebih baik. Keanggotaan koperasi juga meningkat dari 15 menjadi 25 anggota. Saat ini koperasi pun mengirimkan jus pala ke seluruh penjuru negeri, termasuk ibukota Jakarta dan tempat-tempat lain seperti Belanda. Dan tujuannya adalah terus memperluas pangsa pasar.

"Kami saat ini berencana mendirikan koperasi serba guna membuka skema simpan pinjam dan menjual produk-produk lain seperti kebutuhan sehari-hari," kata Genova Mercilyn Maliombo, Sekretaris Koperasi Wanita Sejuk.

Koperasi juga berencana untuk mengikuti program jaminan sosial agar dapat menyediakan perlindungan yang lebih baik bagi para anggotanya. "Bukan sekedar untuk perlindungan di masa mendatang, tapi juga untuk investasi koperasi karena kami dapat memperoleh manfaat dari skema kredit, terutama bila kami ingin memperluas kegiatan usaha ke produksi roti, aksesoris dan perikanan air tawar," jelas Genova.



Kebangkitan koperasi

Pendirian koperasi perempuan ini merupakan bagian dari proyek bersama ILO/UNIDO bernama Pelagandong, yang mencakup 21 desa berpenghasilan rendah di tiga kabupaten sasaran (Kota Ambon, Seram Barat dan Maluku Tengah). Program ini bertujuan untuk

mengembangkan perdamaian dan mengentaskan kemiskinan dengan mengurangi kerentanan penduduk, mempromosikan pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan mata pencaharian di kalangan penerima manfaat yang terkena dampak konflik kemanusiaan.

Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah merevitalisasi dan meningkatkan gerakan koperasi. Usaha berskala kecil memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Berdasarkan statistik terbaru (2012), ada lebih dari 192.000 koperasi di Indonesia dengan jumlah anggota 33,6 juta atau 14,1 persen dari total keseluruhan penduduk. Sebagian besar koperasi ini (sekitar 70 persen) terletak di daerah pedesaan.

"Indonesia adalah contoh yang baik dari kebangkitan koperasi, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi serta mempromosikan inklusi sosial, pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan," kata Simel Esim, Kepala Bidang Koperasi ILO di Jenewa.

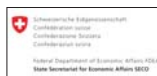
Inklusi Finansial



Sekilas:

Keuangan sosial muncul sebagai pendekatan penting dalam meningkatkan penghasilan dan mengurangi ketidaksetaraan serta kemiskinan di dunia. Keuangan sosial mencakup metode yang memberikan bantuan positif kepada masyarakat melalui kredit, tabungan, asuransi dan produk lain yang dapat membantu masyarakat miskin mengatasi risiko keuangan, memiliki peluang mendapatkan penghasilan, berorganisasi dan memiliki hak suara. Keuangan sosial tidak saja ditujukan bagi masyarakat miskin tapi bagi semua orang yang terkucilkan dari transaksi keuangan formal. Penerima manfaat bervariasi dari keluarga dengan anak yang bekerja, kaum muda dan pekerja rentan, hingga pemilik usaha mikro dan kecil. Melalui pendekatan keuangan sosial, Kantor ILO Jakarta telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal inklusi finansial. Kemitraan ILO dengan Bank Indonesia dalam berbagai kegiatan dan program telah diwujudkan pada tahun ini dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2012:

1. Serikat pekerja dan pengusaha dilatih sebagai pelatih dalam pengelolaan keuangan

menggunakan modul ILO tentang "Pendidikan Keuangan untuk Keluarga" yang telah diuji dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Mereka dilatih untuk menetapkan target keuangan, mengelola uang, membandingkan layanan tabungan, menyusun anggaran dan menerapkannya, serta membuat rencana tabungan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota/pekerja mereka melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan mereka.

2. Meningkatnya kesadaran keuangan melalui pelatihan pelatih bagi para klien dalam kelompok masyarakat marjinal,

seperti orang yang hidup dengan HIV dan AIDS, transgender, pekerja seks dan mantan pemakai narkoba. Pelatihan ini melatih mereka mengelola sumber keuangan guna merencanakan masa depan

dan, pada akhirnya, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kelompok marjinal ini menghadapi berbagai kesulitan seperti akses terhadap pekerjaan layak dan diskriminasi serta stigmatisasi masyarakat yang mengakibatkan mereka sulit bertahan hidup dalam keterbatasan penghasilan dan kesempatan.

3. Kemitraan dengan Bank Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman

yang mencakup sejumlah program seperti kewirausahaan yang ramah lingkungan (*green entrepreneurship*), penilaian dampak sosial dari inovasi lembaga keuangan mikro, dan proyek Mempromosikan Usaha Mikro dan Kecil melalui Peningkatan Akses Pengusaha ke Layanan Keuangan (PROMISE IMPACTS) yang berupaya mengatasi tantangan yang dihadapi usaha kecil dan mikro, didanai oleh Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO).



Target Tahun 2013:

1. Melanjutkan penerapan Proyek PROMISE IMPACTS ILO yang bertujuan mempromosikan pengembangan usaha mikro dan kecil melalui akses yang lebih baik bagi pengusaha ke layanan keuangan.

Kisah Sukses:

Mempromosikan Inklusi Finansial melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan

ILO secara aktif telah mempromosikan inklusi finansial bagi kelompok rentan melalui pelatihan pengelolaan keuangan yang memungkinkan para peserta merencanakan masa depan, mengelola penghasilan secara lebih baik, menghindari hutang, dan mengelola risiko hidup secara lebih baik (sakit, bencana dan sebagainya) yang dapat menempatkan mereka pada posisi keuangan yang sulit sehingga jatuh ke bawah garis kemiskinan.

ILO telah bekerja sama dengan Allianz Indonesia sejak pelatihan pertama untuk pelatih tentang pendidikan keuangan bagi keluarga yang diadakan pada Oktober 2011. Allianz Indonesia merupakan salah satu peserta pelatihan yang mempergunakan manual pelatihan ILO berjudul sama: "Pendidikan Keuangan untuk Keluarga: Manual Pelatih". Manual ini dirancang untuk menyediakan keterampilan dasar bagi keluarga terkait penghasilan, pengeluaran, penyusunan anggaran, tabungan dan pinjaman.

Guna memastikan keberlanjutan pelatihan tersebut dan sebagai komitmen untuk memperkuat kapasitas keluarga dalam meminimalisir risiko keuangan, Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli meluncurkan Program Pengelolaan Keuangan untuk Kalangan Dewasa dari Golongan Ekonomi Kecil dan Menengah. Allianz mengadakan sebuah proyek percontohan pada Juni 2012

di daerah-daerah yang dianggap menghadapi situasi lebih sulit untuk pulih dari kerentanan finansial di kawasan Indonesia Timur (Papua dan Kalimantan Barat).

"Berdasarkan survei untuk mengevaluasi program ini, kami menemukan bahwa pelatihan ini telah berhasil mengubah perilaku keluarga di dua daerah sasaran dalam hal pengelolaan keuangan, manfaat lembaga keuangan mikro serta topik-topik lain yang tercantum dalam modul pendidikan keuangan ILO. Di masa mendatang, Allianz akan memperluas program ini hingga menjangkau lebih banyak keluarga di dalam jaringan Allianz di seluruh Indonesia," kata Indra Yuliawan, Manajer CSR, Allianz Indonesia.

Hingga September 2012, melalui pelatihan untuk pelatih, Allianz melatih 20 orang tenaga pelatih dari kalangan mitra Allianz (10 pelatih di Papua dan 10 pelatih di Kalimantan Barat) serta 16 pelatih dari kalangan karyawan Allianz di Jakarta. Sementara itu, melalui Pelatihan Klien (ToC), Allianz melatih 196 orang peserta: 129 peserta di Pontianak, Kalimantan Barat (95 persen dari mereka



adalah perempuan) dan 67 peserta di Papua (Kota Sentani dan Abepura).

Kendati menghadapi tantangan dalam mengadakan kelas-kelas pelatihan ini, terutama di Papua, namun peserta memberikan masukan positif. Peserta pun mengharapkan Allianz menyediakan kelas-kelas tambahan tentang berbagai topik lanjutan lain. "Melalui kerjasama ini, ILO mengharapkan lebih banyak keluarga yang memiliki pengetahuan dan diberdayakan serta mampu menetapkan sendiri target keuangan mereka dan mencapai target tersebut. Ini akan membantu mereka meningkatkan taraf hidup, menyekolahkan anak-anak serta menikmati hidup yang lebih berarti," kata Tedy Gunawan, Koordinator Program ILO untuk Pengembangan Usaha, Ketengakerjaan Muda dan Keuangan Sosial.

Fase II Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PcDP)

Pelembagaan Pembangunan Mata Pencaharian yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Papua



Sekilas:

Proyek Pelembagaan Pembangunan Mata Pencaharian yang Berkelanjutan ILO/UNDP ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat adat Papua melalui sistem dan proses berbasis pemerintah daerah dan masyarakat madani untuk mengembangkan mata pencaharian secara berkelanjutan. Didanai Pemerintah Selandia Baru, Proyek ini difokuskan pada pembangunan kapasitas para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat Papua, di delapan wilayah kunci: enam kabupaten di Papua dan dua di Papua Barat. Di akhir intervensi, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menggunakan informasi sistematis tentang pasar kerja untuk menyediakan layanan pengembangan usaha bagi masyarakat, termasuk (i) Dukungan terhadap pengembangan potensi usaha lokal di Papua Barat; (ii) Fasilitas atas akses ke layanan keuangan bagi beberapa kelompok bisnis lokal; dan (iii) Pendirian Pusat Pengembangan Usaha Mikro/Inisiatif Inkubasi.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2012:

1.

Kemitraan dengan Bank Indonesia, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), dan Dinas Kooperasi tentang inklusi finansial; kegiatan-kegiatan penelitian terkait lembaga keuangan mikro, rantai pasokan pasar dan inkubator bisnis; serta pelatihan tentang pengembangan usaha mikro di Papua dan Papua Barat.

2.

Kemitraan dengan Bank Indonesia di Papua dan Papua Barat dalam pelaksanaan pelatihan Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda (SIYB) dan Get AHEAD di Jayapura dan Manokwari.

3.

Sekitar 23 peserta (13 laki-laki dan 10 perempuan) dari tiga universitas lokal (Universitas Cendrawasih dan Universitas Ottow Geisler di Papua dan Universitas Negeri Papua (UNIPA) di Papua Barat) berpartisipasi dalam lokakarya induksi dan berbagi pengetahuan, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas peneliti lokal dalam mengembangkan keuangan mikro dan usaha mikro serta memberdayakan masyarakat.

4.

Pelaksanaan serangkaian kegiatan pemetaan dan penilaian tentang Akses ke Layanan Keuangan dan Pengembangan Usaha di dua provinsi dan delapan kabupaten.

5.

Penelitian dilaksanakan oleh proyek ini bekerja sama dengan Bank Indonesia, UNDP, dan Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat.

Sekitar 372 orang (230 laki-laki dan 142 perempuan) secara aktif berpartisipasi dalam lokakarya lintas sektor tentang pemetaan lembaga keuangan dan pembangunan usaha di delapan kabupaten sasaran di Papua dan Papua Barat.

Target Tahun 2013:

1. Mengadakan serangkaian pelatihan tentang pengembangan usaha mikro untuk 450 masyarakat adat Papua di lima kabupaten percontohan: Kabupaten Jayawijaya, Sarmi, dan Boven Digoel di Papua serta Kabupaten Manokwari dan Fak-fak di Papua Barat. Pelatihan ini diikuti dengan kegiatan Bantuan Pasca Pelatihan untuk membantu para peserta dalam manajemen keuangan dan pemasaran.
2. Mengadakan serangkaian kegiatan pemetaan dan survei tentang rantai nilai, iklim usaha, investasi dan diagnostik ketenagakerjaan.
3. Mengadakan pelatihan untuk pelatih tentang Get AHEAD dan pendidikan keuangan untuk keluarga bagi 20 orang pelatih lokal baru di lima kabupaten percontohan.
4. Mengadakan kegiatan pelatihan untuk memperkuat lima lembaga lokal sebagai Pusat Pengembangan Usaha di lima kabupaten percontohan.

Program Pemulihan Mata Pencaharian di Kepulauan Mentawai



Sekilas:

Program ILO Mentawai merupakan bagian dari upaya bersama PBB dengan FAO dan UNDP. Didanai Pemerintah Selandia Baru melalui Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR), Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami pada Oktober 2010 di Kecamatan Pagai Selatan dan Pagai Utara (kurang lebih 501 keluarga) dengan menyediakan bantuan dalam bentuk pemberian bibit dan alat penangkap ikan (FAO); penyediaan pelatihan untuk memastikan pemakaian bantuan secara efektif; dan bantuan untuk organisasi petani, nelayan serta pekerja lain agar dapat meningkatkan kelangsungan pemulihan mata pencaharian mereka. Untuk melengkapi program pemulihan di sektor pertanian dan perikanan dan meningkatkan kelangsungan mata pencaharian di Kepulauan Mentawai, metodologi "4 in 1" akan diterapkan (ILO). Pelatihan "4 in 1" ini dipadukan dengan pelatihan keterampilan kewirausahaan (Get AHEAD) dan pelatihan keterampilan tentang pengembangan usaha mikro, pemasaran dan proses pasca produksi (ILO), di samping penyediaan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah dalam melaksanakan program RENAKSI (UNDP). Bantuan teknis akan diberikan untuk mendukung perencanaan strategis bagi pembangunan ekonomi lokal dan penyediaan layanan dasar.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2012:

1. 30 pemuda Mentawai (9 perempuan dan 21 laki-laki) yang terkena dampak tsunami telah berhasil menyelesaikan dan lulus proses sertifikasi **pelatihan kerja berbasis kompetensi** di tiga bidang: pelatihan servis motor, pembuatan furnitur dan pembuatan makanan ringan. Mereka kini sudah kembali ke Kepulauan Mentawai untuk membangun kembali masyarakat setempat.

2. Ke-30 pemuda Mentawai peserta pelatihan ini pun telah menerima **Bantuan Pasca Pelatihan** agar dapat membuka **usaha sendiri**. Bantuan ini terdiri dari penyediaan peralatan kerja standar untuk membuka usaha sendiri (seperti peralatan pembuatan furnitur, servis motor dan pembuatan makanan ringan serta alat pengemasan) serta bantuan pengembangan usaha oleh sebuah tim konsultan bisnis.

3. 200 perempuan Mentawai menyelesaikan pelatihan terpadu tentang pembuatan makanan ringan dan kewirausahaan menggunakan modul **Get AHEAD ILO**. Pelatihan pembuatan makanan ringan ini difasilitasi oleh peserta pelatihan sebelumnya. Pelatihan kewirausahaan selama lima hari difasilitasi 15 pelatih lokal yang sudah menyelesaikan pelatihan untuk pelatih Get AHEAD ILO selama delapan hari.



Target Tahun 2013:

1. Melanjutkan program Bantuan Pasca Pelatihan, terutama dalam pengembangan pemasaran produk makanan ringan bagi 200 perempuan yang sudah mengikuti pelatihan pembuatan makanan ringan dan pelatihan kewirausahaan.
2. Memfasilitasi akses terhadap lembaga keuangan mikro di Mentawai atau program pinjaman dari pemerintah (KUR) bagi kelompok pembuatan furnitur, servis motor dan produksi makanan ringan.
3. Menghubungkan semua penerima manfaat dengan program-program pemerintah daerah agar dapat memperkuat peluang bagi keberlanjutan proyek.

Kisah Sukses:

Membangun bisnis makanan ringan untuk masyarakat setempat di Mentawai

Lilis Suryani bekerja di perkebunan milik keluarga di Desa Bulasat, Pagai Selatan. Keluarga Lilis tidak menetap di desa tersebut. Namun, karena perlu perawatan, Lilis, sebagai anak tertua, pergi ke Desa Bulasat untuk mengelola perkebunan tersebut. Ingin membantu perekonomian orangtua dan adik-adiknya, Lilis tidak saja mengelola usaha perkebunan tapi juga usaha kebutuhan sehari-hari.

Namun tsunami berdampak besar terhadap mata pencaharian Lilis dan keluarganya. Memperoleh penghasilan yang layak sangat sulit dilakukan karena warga desanya pindah ke lokasi yang lebih tinggi, sehingga ia harus meninggalkan pekerjaan lamanya di Desa Bulasat dan kehilangan mata pencaharian. Tsunami tidak saja memengaruhi perkebunan dan usaha kebutuhan sehari-hari tapi juga memengaruhi penghasilan keluarganya dari sektor perikanan.

Sebelum terjadi tsunami, ayah Lilis membantu penghasilan keluarga dengan menangkap dan menjual ikan. Namun setelah terjadi tsunami, ayahnya berhenti menangkap ikan karena trauma yang menyebabkan ia sangat takut kembali



ke lautan. Saat Lilis mendengar tentang program pelatihan pembuatan makanan ringan, ia bersemangat mengikutinya karena belum ada penghasil makanan ringan di lingkungannya.

“Waktu saya mendengar tentang pelatihan tersebut, saya segera mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini,” katanya. Lilis mengikuti program pelatihan ini sebagai sarana yang tidak saja untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya,

tapi juga untuk menggunakan kesempatan ini agar bermanfaat bagi masyarakatnya. “Setelah pelatihan ini, saya ingin mengundang perempuan pengangguran di lingkungan saya untuk membangun usaha. Saya ingin berbagi pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh dari pelatihan ini dengan warga setempat. Mereka dapat memproduksi makanan ringan untuk selanjutnya dijual ke kota-kota lain di sekitar Mentawai, seperti Sikakap dan Tua Pejat, sehingga dapat meningkatkan kondisi kehidupan dan penghasilan mereka,” ungkapnya.

Kini, Lilis sudah menjalankan bisnis makanan ringannya sendiri. Ia merekrut empat orang perempuan muda dari desanya. Ia memproduksi 80 kemasan makanan ringan per hari dan menjualnya ke sekolah, kantor, toko dan sebagainya. Lilis merupakan salah satu dari 30 pemuda Mentawai yang mengikuti pelatihan keterampilan ILO menggunakan metodologi “4 in 1”. Di samping pelatihan keterampilan, ia juga mengikuti pelatihan kewirausahaan dan menerima bantuan pasca pelatihan dalam bentuk peralatan kerja standar dan bantuan pengembangan usaha. Lilis kini menerima bantuan pengembangan pemasaran dan fasilitas pinjaman kecil.

Mencapai Standar Kehidupan Minimum untuk Masyarakat yang Kurang Beruntung melalui Perdamaian dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa (Proyek Pelagandong)



Sekilas:

Proyek Pelagandong ILO merupakan proyek bersama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) yang dibentuk guna merespons konflik sosial yang terjadi di Provinsi Maluku pada tahun 1999 dan menempatkan Maluku menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Proyek Pelagandong bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan membangun perdamaian di beberapa lokasi sasaran di provinsi Maluku dengan empat tujuan utama yang saling terkait yaitu: (i) Pengorganisasian dan pemberdayaan desa; (ii) Perbaikan mata pencaharian yang berkelanjutan melalui pendidikan, alih teknologi, dan pembangunan ekonomi lokal (LED); (iii) Perdamaian dan pengelolaan konflik; dan (iv) Meningkatkan kondisi hidup, kerja dan kesehatan secara keseluruhan. Didanai UN Trust Fund for Human Security (UNTFHS), proyek ini mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai kegiatan di mana UNIDO bertanggungjawab atas pengembangan keterampilan teknis; sementara ILO mengembangkan keterampilan manajemen (seperti kewirausahaan, keuangan mikro, penciptaan perdamaian dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Proyek ini berakhir pada pertengahan Desember 2012.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2012:

1. **Pemberdayaan 21 desa sasaran yang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pengembangan perdamaian dan pembangunan ekonomi lokal** melalui serangkaian kegiatan festival budaya, yang memamerkan produk dan tradisi budaya lokal dari masing-masing desa.

2. **Sebanyak 1.471 penerima manfaat (917 perempuan) dari delapan desa sasaran** memperoleh pelatihan tentang keterampilan kewirausahaan dasar, menggunakan modul 'Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda' (SIYB) ILO.

3. **Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Perempuan (LKMP) di 10 desa** dengan total anggaran sebesar Rp. 45 juta dari Pemerintah Daerah Maluku untuk masing-masing LKMP. Hasilnya, lebih dari 500 perempuan menerima kredit kecil untuk membuka dan meningkatkan usaha mikro mereka.

4. **Penerapan model keuangan mikro perempuan oleh Pemerintah Maluku** sebagai model pemberdayaan perempuan di Maluku. Untuk mendukung penerapan model ini, panduan teknis tentang pengembangan LKMP telah disusun untuk memastikan keberlanjutan.

5. **Sebanyak 57 orang dari 21 desa dan konstituen tripartit ILO (perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja) dilatih menjadi fasilitator perdamaian dan pengelolaan konflik menggunakan pendekatan pemulihan ekonomi lokal (LER).** Hingga saat ini, para fasilitator telah mengadakan beberapa sesi pelatihan lanjutan di lebih dari 600 komunitas. Modul LER ILO ini mengajarkan praktik terbaik dan pelajaran yang diperoleh sebelumnya agar pembuat keputusan dapat mempertimbangkan dan menerapkan komponen-komponen utama dari keberhasilan program

pemulihan ekonomi pasca konflik, dan upaya pencegahan dan penyelesaian kekerasan dan konflik bersenjata.

6. **Pelatihan dua modul tentang Peningkatan Pekerjaan untuk Rumah yang Aman (WISH) dan Peningkatan Pekerjaan dalam Perbaikan Lingkungan (WIND) untuk 32 fasilitator lokal dari 21 desa proyek dan konstituen tripartit** (perwakilan pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja). Pelatihan modul ini telah diperluas hingga mencakup lebih dari 620 penerima manfaat dari 20 desa proyek, termasuk organisasi pengusaha dan pekerja.

Kisah Sukses:

Harapan Baru melalui Lembaga Keuangan Mikro untuk Perempuan



Salah satu tantangan utama dalam membuka atau meningkatkan usaha mikro di desa Maluku adalah akses terhadap layanan keuangan. Bisa dibilang mustahil bagi warga desa untuk memperoleh dana bantuan Rp. 500.000 dari bank swasta. Di samping itu, proses untuk menjadi anggota koperasi sangat rumit. Satu-satunya kemungkinan untuk memperoleh bantuan keuangan adalah melalui lintah darat (yang dikenal dengan 'Jambul Kuning'), yang menerapkan suku bunga tinggi yaitu 20 persen dengan jangka waktu pinjaman 30 hari. Namun meminjam dari lintah darat jauh lebih sederhana dibandingkan meminjam dari bank atau koperasi.

Model percontohan Lembaga Keuangan Mikro untuk Perempuan (LKMP) dimaksudkan untuk menyediakan sumber pendanaan alternatif bagi warga desa agar dapat mengakses tabungan dan kredit mikro untuk mendanai usaha mereka, terutama perempuan. Dengan jumlah bantuan keseluruhan pemerintah sebanyak Rp. 45 juta, masing-masing LKMP mulai beroperasi pada awal Februari 2012 dengan modal awal Rp. 15 juta. Kemajuan masing-masing lembaga keuangan mikro ini dipantau dan dievaluasi untuk menentukan kelayakan mereka memperoleh bantuan kredit di masa mendatang. Dua LKMP di Desa Nuruwe dan Kamal melaporkan "secara informal" bahwa mereka berhasil memperoleh keuntungan tahunan sebesar Rp. 9 juta dan Rp. 5 juta pada tahun sebelumnya (2012) dari pemberian dana pertama sebesar Rp. 15 juta.

Voni Manoten Salakory, yang baru-baru ini bergabung dengan LKMP Kamal, mengatakan bahwa setelah suaminya meninggal, ia melanjutkan pekerjaan sebagai pengumpul produk pertanian dari Desa Gemba untuk selanjutnya dijual di Ambon. Namun, setelah usahanya hancur karena konflik yang terjadi di Ambon, ia harus membangun kembali usahanya. "Saya butuh uang untuk membangun kembali usaha. Sebagai orangtua tunggal, saya harus bekerja sendiri. Karenanya saya meminjam dana Rp. 500.000 dari LKMP Kamal dan sekarang saya sudah bisa membangun kembali usaha ini. Saya sedang mengembangkan usaha mengumpulkan produk pertanian dari buah-buahan hingga sayur-sayuran dari Desa Taniwel untuk dijual di pasar Ambon," katanya.

Green Jobs di Asia



Sekilas:

Tujuan utama Proyek ini adalah membantu Indonesia beralih ke perekonomian yang rendah karbon, ramah lingkungan dan tahan iklim sehingga dapat mempercepat pemulihan pekerjaan, mengurangi kesenjangan sosial, mendukung target pembangunan serta mewujudkan pekerjaan layak. Didanai Pemerintah Australia, Proyek ini secara langsung mendukung program dan inisiatif nasional yang terkait dengan ketenagakerjaan, perubahan iklim, pengelolaan lingkungan dan bencana serta pemulihan dari krisis ekonomi. Kegiatan-kegiatan Proyek termasuk meningkatkan kapasitas konstituen ILO, panduan kebijakan yang efektif, kegiatan pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*) di lapangan yang ramah gender di sektor-sektor perekonomian tertentu. Jangka waktu proyek ini adalah dua tahun dan berakhir pada September 2012.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2012:

Pencapaian Umum:

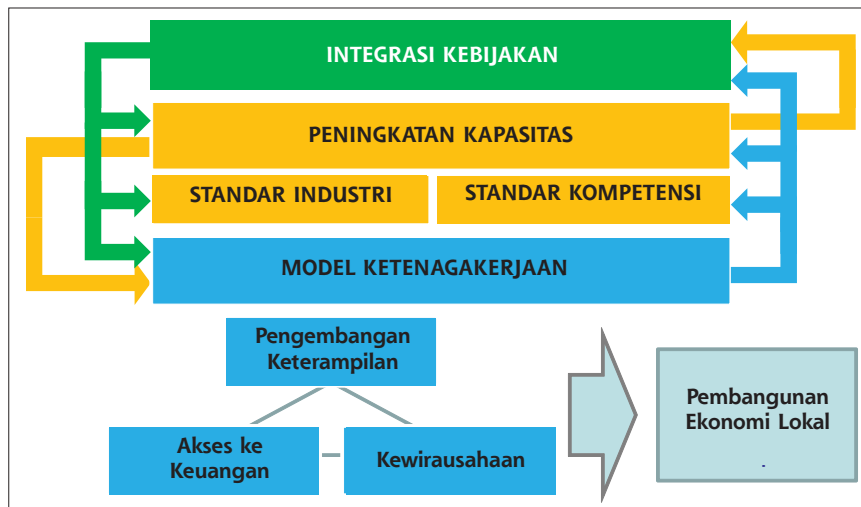
1. **Pelaksanaan serangkaian penelitian terpadu berbasis negara dan sektor**, termasuk penelitian nasional tentang hubungan antara lingkungan dengan ketenagakerjaan serta penilaian potensi penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan (*green jobs*) dan pekerjaan layak.
2. **Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi para konstituen dan mitra nasional** untuk penciptaan *green jobs* dan pembangunan ekonomi, usaha dan pekerjaan yang rendah karbon

serta ramah lingkungan pada skala yang lebih besar.

3. **Pengembangan Rencana Strategis tentang Pariwisata dan Pekerjaan Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan untuk Indonesia.**
4. **Promosi kesempatan untuk melaksanakan *green jobs* di sektor penting melalui proyek percontohan dan dukungan atas program nasional yang ada.** Di Indonesia, proyek percontohan ini sudah dilaksanakan secara berkelanjutan di sektor pariwisata setelah mendapat persetujuan dari Komite Penasihat Proyek.

5. **Pengembangan standar kompetensi dan industri *green homestay*.**
6. **Penyempurnaan standar kompetensi nasional untuk panduan ecotour.**
7. **Memperkuat kerangka kerja untuk mempromosikan *green jobs* di sektor tertentu di Indonesia.**
8. **Pembentukan Komunitas *Green Jobs***, yang bertujuan untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai permasalahan terkait *green jobs*.

Model Strategis untuk Pekerjaan Ramah Lingkungan di Indonesia



B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.



PUK SP

Better Work Indonesia



Sekilas:

Better Work Indonesia (BWI) merupakan suatu program kemitraan antara ILO dan Korporasi Keuangan Internasional (IFC). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan meningkatkan daya saing dalam rantai pasokan global. Better Work berfokus pada solusi yang terukur dan berkesinambungan, melalui penguatan kerjasama di antara pemerintah, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja serta para pembeli internasional. Perlindungan atas hak-hak pekerja mampu mendistribusikan keuntungan dari kegiatan perdagangan dalam rangka meningkatkan pengembangan manusia, sosial dan ekonomi. Kepatuhan pada berbagai standar ketenagakerjaan dapat membantu berbagai perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif dengan memperbaiki akses ke pasar dan pembeli yang potensial. BWI menggabungkan penilaian independen terhadap perusahaan dengan layanan pendampingan dan pelatihan untuk mendukung perbaikan nyata melalui kerjasama di tempat kerja. BWI didukung oleh Pemerintah Australia (AusAID), Departemen Perburuhan Amerika Serikat (USDOL), Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda dan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO)

Didukung oleh:



**International
Finance Corporation**
World Bank Group



Capaian Tahun 2012:

Pendaftaran Pabrik

1. **Pendaftaran 21 pabrik tambahan** yang terletak di provinsi Jawa Barat (Bandung, Sukabumi, dan Majalengka), Jawa Tengah (Semarang) dan Yogyakarta (Sleman) untuk program Tahap II. Digabungkan dengan 51 pabrik di Jakarta dan sekitarnya yang sudah terdaftar sebelumnya, jumlah keseluruhan pabrik yang terdaftar mencapai 72.

Layanan Pendampingan

1. **Pendaftaran 72 pabrik untuk layanan pendampingan BWI di akhir Desember**, di mana 51 pabrik terletak di Jakarta dan sekitarnya. Hingga saat ini, 45 pabrik sudah menerima layanan pendampingan dan 15 laporan kemajuan telah disusun (dari awal pengoperasian hingga akhir Juni).

Layanan Pelatihan

1. **Pemberian modul pelatihan dua hari mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi pabrik-pabrik Better Work**, yang memperkenalkan komite K3 dengan peraturan baru (Peraturan Pemerintah No. 50/2012) tentang sistem pengelolaan K3. Modul ini dikembangkan bersama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan.

2. **Penerapan panduan Better Work tentang disabilitas** oleh pabrik-pabrik di bawah naungan NIKE.

3. **Pengembangan paket pelatihan dan informasi tentang mempekerjakan penyandang disabilitas bagi merek dan pabrik**, dengan pendampingan lebih lanjut dari Organisasi Penyandang Disabilitas ke pabrik mengenai bagaimana mengembangkan dan menerapkan kebijakan mempekerjakan penyandang disabilitas guna mendukung penegakkan peraturan kuota 1 persen (1 per 100),

4. **Pelaksanaan panduan BWI tentang HIV dan AIDS** oleh NIKE bagi para manajer dan pekerja di pabrik-pabrik mereka.

5. **Pengembangan paket informasi mengenai upaya membantu perempuan agar dapat terus menyusui saat kembali bekerja**, dengan dukungan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Paket informasi ini diciptakan sejalan dengan peraturan pemerintah baru yang mewajibkan semua pengusaha mengembangkan kebijakan perusahaan untuk mengatasi masalah ini. BWI juga menjalin kerjasama dengan AIMI dalam menawarkan pelatihan kepada pabrik-pabrik tentang bagaimana mengembangkan dan

menyediakan tempat kerja yang ramah bagi pekerja perempuan yang menyusui.

6. **Pengembangan program media sosial terpadu, seperti SMS, Facebook dan Twitter**, guna memberi informasi kepada pekerja tentang hak hukum mereka, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan di tempat kerja.

Serikat Pekerja

1. **Pengembangan modul pelatihan oleh 19 pengurus serikat pekerja terlatih dari empat federasi** tentang peran dan fungsi serikat pekerja; pelibatan perempuan dalam kegiatan serikat pekerja; serta pengelolaan administrasi dan keuangan serikat pekerja di tingkat pabrik. Modul ini mempergunakan materi dan modul pelatihan yang ada dari berbagai organisasi, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC) dan ILO ACTRAV.

Komunikasi

1. **Penyebaran informasi tentang BWI melalui situs, warta dan informasi hukum.**

Kisah Sukses:

Memerangi disabilitas dari dalam

Angela Friska mulai mengalami gangguan pernapasan (asma) sewaktu berusia delapan tahun. Orangtuanya segera mendapati bahwa konsumsi obat keras mempengaruhi kemampuan pendengaran Friska karena mereka harus mengulang-ulang kata-kata yang diucapkan. Saat berusia 10 tahun, Friska divonis mengalami kerusakan pendengaran secara permanen. Situasi ini meruntuhkan rasa percaya dirinya.

Sekolah menjadi siksaan bagi dirinya sehari-hari. Dan situasi ini terus berlanjut hingga ia duduk di bangku kuliah. Ia membutuhkan enam tahun untuk menyelesaikan skripsi program sarjana empat tahun di bidang teknik informatika. “Membayangkan saat pengujian saja sudah cukup membuat saya panik. Dan saya pun berpikir, walaupun lulus, apa yang selanjutnya akan saya lakukan? Perusahaan mana yang bersedia menerima karyawan seperti saya?” kenangnya.

Perubahan dalam hidup

Kehidupannya mulai berubah saat ia aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan menjadi sukarelawan mengevakuasi korban bencana gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta, Pulau Jawa. Tidak saja menemukan kembali jati diri serta

kemampuannya, ia juga menyadari mampu melakukan sesuatu yang berarti bagi sesama.

“Sebagian besar korban mengalami patah tulang. Kami menggotong mereka ke tempat yang lebih aman di mana mereka menunggu perawatan medis,” kenangnya.

Selanjutnya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga TI di salah satu grup perusahaan media terbesar di Indonesia (Femina). Rekan kerjanya di kantor mengetahui dan menerima kondisinya yang berbeda. Komunikasi melalui telepon digantikan dengan surat elektronik.

Kini Friska bergabung dengan Better Work Indonesia (BWI), yaitu sebuah program bersama ILO dan Korporasi Keuangan Internasional sebagai seorang konsultan untuk program disabilitas.

Tugasnya adalah meningkatkan kesadaran para pengusaha, terutama pengusaha garmen, untuk bisa berperan serta dalam memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Selama beberapa bulan ke depan, ia akan mendampingi penasihat perusahaan Better Work mengunjungi pabrik-pabrik untuk berdiskusi dengan pihak manajemen dan komite pekerja tentang cara merekrut penyandang disabilitas dan

memastikan pabrik mematuhi peraturan perundangan Indonesia.

“Para penyandang disabilitas harus bisa menyesuaikan dengan non-disabilitas, dan saya yakin mereka mampu,” ujarnya.

Memenuhi kuota disabilitas

Di Indonesia, perusahaan diwajibkan peraturan perundangan memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas, dan akan didenda bila gagal memenuhi kuota 1 persen. Sejumlah pabrik garmen di Indonesia memiliki lebih dari 100.000 pekerja, ini artinya minimal 1.000 penyandang disabilitas. Pada saat ini, jumlah rata-ratanya kurang dari 100.

“Sebagian besar pabrik garmen tidak dapat memenuhi kuota wajib pemerintah akibat kurangnya informasi, stigma dan sikap diskriminatif pengusaha dan sesama pekerja,” jelas Simon Field, manajer program BWI.

Para pakar ILO dan Friska telah mempersiapkan panduan untuk membantu perusahaan dalam merekrut penyandang disabilitas. Friska juga akan membantu penyandang disabilitas dalam menyesuaikan diri dengan tempat kerja.

Pada Agustus 2012, BWI mengadakan pertemuan bersama organisasi penyandang disabilitas dan pembeli untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Semua peserta sangat mendukung ide peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas dan memenuhi komitmen perusahaan atas kuota pekerja disabilitas.

“Pertemuan ini hanya awal dari serangkaian proyek BWI untuk membantu penyandang disabilitas dengan akses ke sektor perekonomian formal, seperti industri garmen,” kata Field. “Kami butuh komitmen yang lebih kuat dari pembeli internasional, pengusaha dan pekerja disabilitas agar penyandang disabilitas dapat menjadi agen perubahan.”

Target Tahun 2013:

1. Minimal 120 pabrik akan mendaftar dengan BWI. Minimal 60 pabrik akan menerima laporan penilaian pertama mereka dan 30 penilaian kedua pada Maret 2013. Layanan pendampingan akan dibentuk di 90 pabrik.
2. Strategi untuk melakukan pengoperasian di Jawa Tengah akan dikembangkan dan disetujui.

Hubungan Industrial yang Efektif dalam Konteks Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Efektif



Sekilas:

Peningkatan hubungan industrial telah lama menjadi salah satu fokus ILO di Indonesia. Agar efektif dalam menerapkan sistem hubungan industrial, para aktor tripartit (pekerja, pengusaha dan pemerintah) harus meningkatkan peran, fungsi dan kompetensi mereka. ILO bekerja di tiga bidang strategis dalam hubungan industrial, seraya membangun kapasitas konstituen tripartitnya, yaitu:

- ♦ Administrasi ketenagakerjaan yang efektif, melalui upaya memperkuat inspektorat pengawasan ketenagakerjaan untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan kerja;
- ♦ Dialog sosial yang efektif di antara konstituen tripartit untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan internasional; dan
- ♦ Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi pengusaha dan pekerja sesuai mandat dan kewajiban masing-masing.

.. Capaian Tahun 2012:

1. **Penyusunan kurikulum baru untuk pelatihan wajib Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan modul ILO tentang Membangun Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang Modern dan Efektif.** Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan serta Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru-baru ini mengembangkan kurikulum baru untuk pelatihan selama empat bulan dengan penekanan pada penyediaan “keterampilan lunak” bagi pengawas ketenagakerjaan yang baru direkrut. Pengembangan modul pelatihan ini diikuti dengan pelatihan sekitar 40 orang pelatih untuk menjalankan kurikulum baru tersebut.

2. **Pembentukan komite tripartit Pengawasan Ketenagakerjaan untuk memastikan partisipasi pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan pengawasan**

ketenagakerjaan. Pembentukan komite tripartit ini diawali dengan Komitmen Tripartit pada Oktober 2011, diikuti dengan Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2012 yang membentuk Komite Pengawasan Ketenagakerjaan pada April 2012. Komite Pengawasan Ketenagakerjaan memiliki tugas sebagai berikut:

- ♦ Memberi masukan kepada Menteri dalam merumuskan dan menentukan kebijakan tentang pengawasan ketenagakerjaan;
- ♦ Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai sumber masukan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja pengawasan ketenagakerjaan;
- ♦ Memberi saran dan pertimbangan dalam mewujudkan pengawas ketenagakerjaan yang independen dan profesional; dan
- ♦ Menginformasikan indikasi pelanggaran peraturan perundangan ketenagakerjaan.

3. **Organisasi pekerja dan pengusaha secara aktif mengadakan pelatihan bagi para anggota mereka.** Pekerja terus memberi advokasi tentang pelaksanaan kebebasan berserikat, upah layak dan jaminan sosial. Pengusaha di bawah naungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkuat peran mereka dalam menyuarakan kepentingan pengusaha dan bisnis, khususnya terkait masalah upah dan outsourcing. Salah satu kesepakatan yang dicapai organisasi pekerja dengan Apindo mengenai upah minimum adalah penggunaan data Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menetapkan upah minimum di Jawa Tengah. Hal ini dapat mengurangi kontroversi tentang penetapan upah minimum di provinsi tersebut.

Target Tahun 2013:

1. Pengadopsian strategi pelatihan tentang pengawasan ketenagakerjaan di tingkat nasional dan daerah oleh pemerintah pusat dan daerah terkait (minimal dua provinsi).
2. Meningkatkan pemahaman pengawas ketenagakerjaan tentang kesetaraan gender melalui pengembangan modul Kesetaraan Gender dan pembentukan kelompok pelatih.
3. Menerbitkan Profil Nasional tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai referensi komprehensif tentang kondisi K3 di Indonesia.
4. Konstituen tripartit menyusun rencana aksi tentang pelaksanaan kebebasan berserikat di sektor garmen, tekstil dan alas kaki.
5. Penetapan dan perundingan upah minimum yang lebih baik di tingkat perusahaan, termasuk melalui pemahaman yang lebih baik tentang prinsip kesetaraan upah.
6. Apindo akan memiliki program sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM).
7. Lembaga Kerjasama Bipartit di sejumlah perusahaan terpilih akan ditingkatkan dan dilaksanakan secara efektif.

C. Perlindungan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.



Perlindungan Sosial untuk Semua



Sekilas:

Tujuan utama dari program perlindungan sosial ILO Jakarta adalah mencapai target Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) guna memastikan pemerintah dan mitra sosial ILO, yaitu organisasi pengusaha dan pekerja, memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program perlindungan sosial. Program utama tahun 2012 difokuskan pada upaya untuk mempromosikan Landasan Perlindungan Sosial (LPS), sesuai Rekomendasi ILO No. 202 yang diadopsi dalam sidang Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-101 tahun 2012. Rekomendasi No. 202 ini menghasilkan penelitian dan peluncuran laporan berjudul "Penilaian Perlindungan Sosial berdasarkan Dialog Nasional", yang telah merekomendasikan pendekatan "Layanan Satu Atap" untuk meningkatkan penyuluhan layanan sosial dan ketenagakerjaan bagi kelompok rentan dan kelompok yang belum terjangkau sebelumnya.

Didukung oleh:



• • Capaian Tahun 2012:

1. **Pengesahan laporan terbaru ILO, "Penilaian Perlindungan Sosial berdasarkan Dialog Sosial: Menuju Perlindungan Sosial di Indonesia" oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai basis perumusan kebijakan dan program agar dapat mengintegrasikan kebijakan dan program perlindungan sosial yang ada di Indonesia.**

Kompilasi laporan melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional dan provinsi termasuk Kerangka Kerja Kemitraan Pembangunan PBB (UNPDF) di bagian sub-unit LPS (diketuai ILO). Indonesia merupakan negara anggota ILO pertama yang langsung menindaklanjuti tindakan pasca penerapan Rekomendasi ILO No. 202 dalam ILC yang diselenggarakan pada Juni 2012.

2. **Penerapan pendekatan Layanan Satu Atap (LSA) oleh dua pemerintah daerah (Jawa Timur dan Maluku) dan satu pemerintah kabupaten di Soe-Timor Tengah Selatan. Proyek kerjasama teknis untuk pelaksanaan LSA di dua kabupaten percontohan di provinsi Jawa Timur dan Maluku**

dikembangkan pada Desember 2012, didanai Pemerintah Jepang dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Jawa Timur untuk memastikan keberlanjutannya.

3. **Penyerahan masukan teknis ILO atas permintaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tentang skema kecelakaan kerja dan kematian untuk menyusun peta jalan skema jaminan sosial ketenagakerjaan nasional.**

Masukan ini akan mendukung perumusan peraturan pelaksanaan layanan jaminan sosial baru berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah disahkan untuk skema asuransi kesehatan dan jaminan sosial universal.

4. **Kemitraan dengan Pasca Sarjana Bidang Diplomasi Paramadina (PGSD) untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan** tentang berbagai permasalahan terkait pengembangan kebijakan dan program jaminan sosial, terutama: skema tunjangan, pengaturan kelembagaan, keuangan dan perluasan anggota, serta sarana pembiayaan bagi praktisi dan pembuat kebijakan. Kemitraan ini juga telah diperluas hingga mencakup lembaga akademik lain, seperti Universitas Katholik Parahyangan dan AKATIGA, yang merupakan para pemikir (*think-tank*) masalah sosial dan ketenagakerjaan.

5. **Penerapan pendekatan "Layanan Satu Atap" oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Maluku** sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan, dan pelaksanaan studi kelayakan untuk melaksanakan pendekatan layanan tersebut melalui dialog partisipatif dengan para pemangku kepentingan terkait. Saat ini, ketiga pemerintah daerah telah membuat komitmen anggaran bagi pelaksanaan program agar dapat memastikan keberlanjutannya.

6. Lebih dari 200 orang pekerja di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Batam, Surabaya, Kupang dan Ambon telah menerima pelatihan LPS dan jaminan sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang skema jaminan sosial dan membantu peningkatan jumlah pekerja yang berpartisipasi dalam program ini.

Peningkatan partisipasi pekerja sebesar 10 persen dalam program jaminan sosial Jamsostek yang ada yaitu dari 10,1 juta pekerja tahun 2011 menjadi 11,2 juta pada 2012 (berdasarkan statistik Jamsostek).

Target Tahun 2013:

1. Memberikan masukan teknis atas menyusun peta jalan DJSN dan peraturan pelaksanaannya.
2. Kegiatan peningkatan kapasitas dan tindak lanjutnya untuk melaksanakan sejumlah rekomendasi laporan penilaian LPS, termasuk analisis tentang kesenjangan fiskal dan proyek layanan satu atap (kegiatan ini membutuhkan mobilisasi sumber daya tambahan).

Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia)



Sekilas:

Proyek PROPEL-Indonesia bertujuan mengatasi masalah kesenjangan dalam hal kebijakan dan perlindungan peraturan perundangan terkait pekerjaan dan pelatihan bagi para penyandang disabilitas guna memastikan kesesuaiannya dengan standar internasional. Proyek ini mendukung pemerintah, serta pemangku kepentingan utama lainnya dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan dan pelatihan, melalui kerjasama dengan para mitra dalam membangun kapasitas pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas. Didanai Irish Aid, Proyek PROPEL-Indonesia dimulai pada Juni 2012, sebagai bagian dari Proyek PROPEL global yang dilaksanakan di beberapa negara Asia dan Afrika.

Didukung oleh:



• • Capaian Tahun 2012:

1. **Konsultasi dan berbagi pengetahuan dengan penyandang disabilitas**, termasuk organisasi penyandang disabilitas di tingkat regional, nasional dan daerah, organisasi internasional lainnya, lembaga pelatihan serta pemangku kepentingan lain yang menangani masalah disabilitas.

2. **Kemitraan dengan Universitas Katholik Atma Jaya dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas** di kalangan mahasiswa hukum serta menyusun rencana untuk memasukkan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam hal pekerjaan dan ketenagakerjaan, pada mata kuliah hak asasi manusia di Fakultas Hukum.

3. **Pemaparan dan pengkajian hasil temuan awal mengenai peluang penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan kerja di Indonesia** serta kebutuhan dan tantangan yang dihadapi organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan advokasi mereka.

4. **Menjangkau pabrik-pabrik garmen yang mempekerjakan atau tidak mempekerjakan penyandang disabilitas** agar dapat membantu pemenuhan peraturan perundangan tentang kuota 1 persen, bekerja sama dengan Better Work Indonesia.



Target Tahun 2013:

1. Mengadakan serangkaian lokakarya peningkatan kapasitas bagi para konstituen dan pemangku kepentingan lain di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Lokakarya ini difokuskan pada hak penyandang disabilitas di tempat kerja, terutama yang terkait dengan peraturan perundangan dan inklusi penyandang disabilitas.
2. Meningkatkan kesadaran media tentang hak penyandang disabilitas dan penggambaran penyandang disabilitas melalui media. Kegiatan ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Majalah Diffa.

Program Pekerja Anak



Sekilas:

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002. Indonesia kini sudah separuh jalan dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional 20 tahun. Selama 10 tahun terakhir, Pemerintah dan LSM telah bersama-sama memerangi pekerja anak di Indonesia. Diperkirakan sekitar empat juta anak usia 5-17 tahun terlibat dalam pekerjaan: sekitar 1,4 juta anak di bawah usia 13 tahun melakukan pekerjaan, 650.000 (13-14 tahun) anak melakukan pekerjaan tetap (non-ringan) dan dua juta anak usia (15-17) tahun melakukan pekerjaan berbahaya.

Pada 2012, ILO melaksanakan Proyek Global untuk Memerangi Pekerja Anak melalui Pendidikan dengan tujuan memperkuat hubungan di tingkat kebijakan antara pekerja anak dan pendidikan yang mengarah pada aksi yang akan meningkatkan peluang mereka yang terlibat atau rentan terhadap pekerja anak. Didanai Kementerian Luar Negeri Pemerintah Belanda, proyek ini dilaksanakan di empat negara, termasuk Indonesia. Proyek ini dimulai pada September 2011 dan dilaksanakan di tiga daerah: Jakarta dan sekitarnya, Kabupaten Sukabumi dan Kota Makasar, serta akan berlanjut hingga tahun 2013.

Didukung oleh:



• • Capaian Tahun 2012:

1. Bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak, 100 pemulung anak di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang di Sulawesi Selatan menerima pendidikan formal dan non formal, termasuk pendidikan keterampilan kerja dan kecakapan hidup.

2. Peningkatan kapasitas pekerja sosial dan Dinas Pendidikan Jakarta tentang pendidikan kecakapan hidup menggunakan modul pelatihan “3R” ILO (Hak, Tanggung Jawab dan Representasi). kegiatan peningkatan kapasitas ini diadakan bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Kementerian Sosial, dengan tujuan meningkatkan mutu layanan pendidikan di lima pusat kegiatan belajar masyarakat di Jakarta bagi anak-anak jalanan.

3. Penyediaan program pra-kerja guna meningkatkan kecakapan pribadi dan sosial

4. Penerbitan dua studi tentang hubungan antara pekerja anak dengan pendidikan: (1) Laporan baru dari Understanding Children’s Work (UCW) yaitu kemitraan antara ILO, UNICEF dan Bank Dunia—“Memahami Pekerjaan yang Dilakukan oleh Anak dan Pekerja Muda: Kondisi Indonesia”; dan (2) Studi Pekerja Anak dan Pendidikan di Indonesia.

Pelaksanaan kampanye nasional tentang pekerja anak dan pendidikan sebagai bagian dari serangkaian kegiatan yang diadakan ILO dan para mitranya untuk memperingati Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia 2012 melalui berbagai upaya nasional memerangi pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya.

- ♦ Pembuatan enam video inovatif tentang pekerja anak dan pendidikan. Kali pertama dilakukan, video-video ini diproduksi sendiri oleh pekerja anak di Jakarta, Sukabumi dan Makassar yang mewakili lima bentuk pekerja anak: anak jalanan, pemulung, pekerja rumah tangga anak (PRTA), pekerja anak di pabrik dan anak yang dilacurkan. Video-video ini tersedia di www.childlabourvoice.org.
- ♦ Peningkatan kesadaran media melalui program penghargaan dan beasiswa media tentang pekerja anak dan pendidikan, bekerja sama dengan AJI Jakarta.
- ♦ Pelibatan serikat pekerja dan peningkatan kesadaran, bekerja sama dengan konfederasi serikat pekerja nasional utama (KSBSI, KSPI dan KSPSI), untuk secara aktif mendidik dan melibatkan partisipasi para anggota mereka.

Target Tahun 2013:

1. Terus mendukung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pengembangan Peta Jalan untuk Menghapus Pekerja Anak di Indonesia pada tahun 2022.
2. Mengadakan penelitian dan mengembangkan ringkasan kebijakan tentang pekerja anak dan pendidikan guna memperkuat pengarusutamaan pekerja anak ke dalam sektor pendidikan.
3. Melaksanakan proyek terbaru ILO untuk menghapus pekerja anak di sektor pekerjaan rumah tangga, didanai Departemen Perburuan Amerika Serikat, di empat provinsi: Jakarta dan sekitarnya, Lampung, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
4. Memperingati Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia, dengan tema “Katakan Tidak pada Pekerja Anak dalam Pekerjaan Rumah Tangga”.

Melindungi Pekerja Migran Indonesia



Sekilas:

Bagian ini memaparkan dua proyek migrasi kerja/ pekerja rumah tangga migran. Proyek pertama adalah Proyek ILO untuk Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan terhadap Pekerja Migran yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan layanan bagi pekerja migran, terutama pekerja rumah tangga migran di luar negeri. Didanai Kedutaan Besar Norwegia, Proyek ini bekerja melalui konstituen tripartit ILO dan mitra lainnya seperti LSM Indonesia. Proyek ini juga bekerja sama dengan mitranya di Singapura dan Hongkong. Proyek ini dimulai pada tahun 2006 dan berakhir pada Maret 2012.

Proyek kedua adalah Proyek ILO tentang Tindakan Tripartit untuk Melindungi Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek Triangle) yang bertujuan untuk mengurangi secara signifikan eksploitasi pekerja migran di kawasan ini melalui peningkatan migrasi secara sah dan aman serta peningkatan perlindungan kerja. Proyek ini akan mempromosikan pendekatan bilateral dan regional untuk menangani masalah-masalah bersama, membuat regionalisme yang lebih efektif, serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di ASEAN. Proyek ini didanai CIDA Kanada, sebagai proyek migrasi kerja regional, yang dimulai pada Maret 2012 hingga tahun 2016.

Didukung oleh:



• • Capaian Tahun 2012:

Proyek ILO untuk Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan terhadap Pekerja Migran Indonesia

1. **Berkontribusi pada promosi ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga** mereka melalui berbagai kampanye umum dan rapat-rapat pemangku kepentingan yang menghasilkan ratifikasi Konvensi tersebut oleh Indonesia bulan April 2012.

2. **Dukungan terhadap berbagai kampanye umum dan rapat pemangku kepentingan yang menghasilkan penandatanganan surat resmi oleh Presiden Indonesia kepada parlemen Indonesia.** Surat tersebut menandai awal pembahasan resmi di parlemen atas revisi Undang-Undang tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (39/2004) antara pemerintah dengan parlemen Indonesia.

3. **Berkontribusi pada promosi ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga oleh Indonesia** melalui berbagai kampanye umum dan rapat pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan ini menghasilkan keputusan Pemerintah Indonesia untuk menerima salah satu dari rekomendasi Kajian Berkala PBB tahun 2012 untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189.

4. **Dukungan terhadap peningkatan kapasitas pekerja**

migran dan keluarga mereka melalui serangkaian pelatihan tentang pendidikan keuangan di dua provinsi (Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat) dan tentang kewirusahaan di tujuh provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sulawesi Selatan).

5. **Dukungan teknis pada program peningkatan kapasitas yang komprehensif dan peka terhadap masalah gender dan HIV dan AIDS** dalam bentuk kampanye media, kampanye advokasi, lokakarya dan diskusi masyarakat bagi pekerja migrant baik di tingkat nasional maupun komunitas.

Aksi Tripartit ILO untuk melindungi Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek Triangle, Indonesia)

1. **Memfasilitasi Rapat Persiapan Nasional serikat pekerja Indonesia dan organisasi masyarakat madani untuk forum ASEAN ke-5 tentang Pekerja Migran (AFML)** pada Oktober 2012 yang berkontribusi pada upaya mempromosikan perlindungan bagi pekerja migran melalui mekanisme ASEAN.

Target Tahun 2013:

1. Mendukung Rapat Regional di Indonesia tentang pekerjaan di sektor perikanan di ASEAN yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia.
2. Mendukung Rapat Persiapan Nasional serikat pekerja Indonesia dan organisasi masyarakat madani untuk Forum ASEAN ke-6 tentang Pekerja Migran (AFML).
3. Mendukung Rapat Regional tentang Kualifikasi Keterampilan termasuk pekerja rumah tangga.
4. Mendukung Pemberian Penghargaan Jurnalisme di tingkat Regional tentang Pekerja Migran di ASEAN dalam memperingati Hari Migran Internasional 2013.

Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja



Sekilas:

Sejak peluncuran Kaidah ILO tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, sejumlah kebijakan dan program telah diperkenalkan, termasuk peluncuran keputusan menteri tahun 2004; pelaksanaan program perusahaan secara luas di seluruh negeri; serta berbagai inisiatif percontohan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan orang yang hidup dengan HIV. Pada Juni 2010, ILO mengadopsi Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja. Rekomendasi ini merupakan standar ketenagakerjaan internasional pertama dan satu-satunya tentang HIV dan hak asasi manusia serta merupakan instrumen normatif yang didasarkan untuk memandu pelaksanaan inisiatif HIV di tempat kerja. Prioritas utama kegiatan ini di Indonesia adalah memastikan bahwa inisiatif landasan perlindungan sosial (LPS) di bawah kerangka kerja Undang-Undang Jaminan Sosial yang baru menjangkau orang yang hidup dengan HIV. Prakarsa di tempat kerja harus dapat menjangkau sektor-sektor yang terbukti lebih rentan terhadap prevalensi HIV yang tinggi di kalangan pekerja, termasuk sumber daya alam, transportasi darat dan laut jarak jauh dan sektor hiburan.

• • Capaian Tahun 2012:

1. **Finalisasi dan penerapan komponen HIV dan AIDS dalam Landasan Perlindungan Sosial (LPS)** oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

2. **Finalisasi komponen pembiayaan HIV dan AIDS dengan mengintegrasikan masukan dari tim gabungan PBB tentang HIV,** yang terdiri dari UNICEF, WHO dan UNFPA di bawah fasilitasi UNAIDS. Komponen biaya ini menyediakan beberapa skenario untuk mengintegrasikan upaya pencegahan, perawatan dan layanan HIV dan AIDS ke dalam sistem layanan kesehatan yang ada.

3. **Penetapan Keputusan Menteri No. 20 Tahun 2012 tentang Perluasan Cakupan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (termasuk HIV).**

Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan advokasi ILO secara berkelanjutan melalui dialog nasional tentang proses LPS. Keputusan ini memperbaiki keputusan sebelumnya tentang cakupan Jamsostek dari Rp. 10 juta menjadi Rp. 20 juta per orang/tahun bagi semua anggota Jamsostek.

4. **Finalisasi strategi Komite Aksi Nasional tentang Pekerja Migran dan penerapan Kajian Literatur dan Penelitian ILO tentang Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender dan Kerentanan HIV di Kalangan Pekerja Migran.** Strategi ini merupakan bagian dari strategi nasional HIV dan AIDS.

5. **Finalisasi dan penerapan paket informasi media dan modul pelatihan tentang HIV dan AIDS**

oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memperkuat komponen HIV dalam pelatihan pra-keberangkatan bagi calon pekerja migran.

6. **Kajian mengenai modul pelatihan untuk pelatih untuk program di tempat kerja oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Komisi AIDS Nasional dengan mengadopsi Rekomendasi ILO No. 200.** Modul yang sudah dikaji ini akan digunakan sebagai modul nasional dan akan menjadi bagian dari intervensi sektor swasta terkait Program Pencegahan Penularan HIV melalui Transmisi Seksual (PMTS Paripurna).

Target Tahun 2013:

1. Melanjutkan upaya memperkuat advokasi masyarakat dengan membentuk dan menjalankan Gugus Tugas Nasional untuk Perlindungan Sosial yang Sensitif HIV guna memastikan terintegrasinya masalah HIV ke dalam penyediaan akses universal ke layanan kesehatan pada 2014 (BPJS 1) serta meningkatkan kapasitas masyarakat yang terkena dampaknya.
2. Menerapkan Layanan Satu Atap (LSA) di provinsi Jawa Timur dengan mengintegrasikan HIV dan AIDS ke dalam mekanisme yang ada.
3. Mengadakan penelitian tentang Akses dan Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Pekerja Laki-laki dan Perempuan di Sektor Ekonomi Informal yang Hidup dengan HIV, termasuk keluarga mereka.
4. Mendukung Komisi AIDS Nasional dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelesaikan Modul Pelatihan untuk Pelatih Program HIV di Tempat Kerja serta menindaklanjuti kegiatan untuk memastikan pelaksanaan program HIV dan AIDS di tujuh perusahaan terlatih di bawah program Better Work ILO.

Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripatisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diurusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.

Akses terhadap Pekerjaan dan Pekerjaan Layak Bagi Perempuan (MAMPU)



Sekilas:

Proyek MAMPU ILO merupakan proyek yang didanai AusAID untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial dengan strategi memperkuat akses perempuan dan partisipasi yang adil dalam pekerjaan formal dan pekerjaan layak di Indonesia. Proyek ini bekerja sama dengan beberapa lembaga dan organisasi di Indonesia untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan utama dalam mempromosikan tujuan Proyek yaitu meningkatkan akses masyarakat miskin, masyarakat rentan dan perempuan marjinal terhadap pekerjaan layak serta mempromosikan kesetaraan kerja.

Didukung oleh:



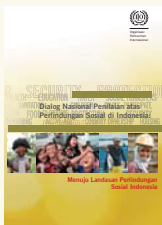
.. Capaian Tahun 2012:

1. **Pelaksanaan penelitian tentang hambatan atas akses perempuan dalam memperoleh pekerjaan serta diskriminasi pekerjaan di dua provinsi di Indonesia** (Sumatera Utara dan Jawa Timur), yang mencakup 790 orang responden. Penelitian ini menyediakan beberapa data mendasar tentang akses perempuan atas pekerjaan, diskriminasi dalam pekerjaan serta pandangan masyarakat tentang peran perempuan di tempat kerja.
2. **Penyusunan fase kedua Proyek MAMPU yang difokuskan pada upaya membantu pekerja perempuan yang berbasis di rumah.** Kegiatan ini dilakukan melalui konsultasi luas dan penelitian lapangan bersama para mitra proyek dan pemangku kepentingan.
3. **Peningkatan kapasitas serikat pekerja terkait kesetaraan gender** dengan melatih 30 pimpinan serikat pekerja di Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara tentang konsep dan prinsip kesetaraan gender serta strategi untuk mewakili kepentingan dan hak perempuan secara lebih baik di tempat kerja.
4. **Penyusunan panduan tentang kesetaraan upah,** bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Target Tahun 2013:

1. Memprakarsai program percontohan untuk memperkuat kondisi kerja dan perlindungan sosial bagi perempuan di sektor usaha kecil dan mikro.
2. Memperkuat kapasitas penyedia layanan pengembangan usaha agar dapat menyediakan layanan yang pro masyarakat miskin serta merespons kebutuhan penerima manfaat.
3. Meningkatkan organisasi, kepemimpinan dan akses ke layanan bagi pekerja rumahan.
4. Memperkuat kapasitas serikat pekerja dan organisasi masyarakat madani untuk mempromosikan hak-hak pekerja rumahan serta mengorganisir pekerja non-standar.
5. Memperkuat kesadaran dan kemampuan pemerintah pusat dan provinsi dalam merespons kebutuhan pekerja rumahan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal pekerjaan.
6. Memperkuat kapasitas pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya melindungi dan memberdayakan pekerja perempuan.
7. Mengurangi hambatan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dengan menyediakan dan menguji model pengasuhan anak berbasis komunitas.

Publikasi Utama



Penilaian landasan perlindungan sosial berdasarkan dialog nasional: Menuju landasan perlindungan sosial Indonesia

ISBN: 9789220270097

Kerangka kerja landasan perlindungan sosial dapat digunakan untuk menggambarkan program jaminan sosial, perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan yang ada, mengidentifikasi permasalahan kesenjangan kebijakan dan pelaksanaan serta penyusunan rekomendasi dalam merancang dan menerapkan perlindungan sosial guna memastikan penerapan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.



Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2012 - 2015

Program ini menetapkan tiga prioritas sebagai berikut: penciptaan lapangan kerja, hubungan industrial dan perlindungan sosial, yang sejalan dengan hasil, strategi, indikator dan target. Program ini mencerminkan konteks sosioekonomi saat ini, prioritas nasional Indonesia, mandat ILO dan prioritas para konstituen ILO.



Perdagangan di bidang Jasa dan ketenagakerjaan di Indonesia: Kasus Indonesia

ISBN: 9789228264890

Studi ini mengkaji pentingnya sektor jasa dan keterkaitannya dengan sektor-sektor lain dalam hal nilai tambah dan ketenagakerjaan dari data nasional, data perdagangan dan angkatan kerja serta data *input-output* dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia.



Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2011: Mempromosikan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi

ISBN: 9789220261576

Laporan ini terfokus pada pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi. Tema yang mendasari laporan ini "mempromosikan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi" disusun berdasarkan prinsip-prinsip Pemerintah saat ini, pertumbuhan yang "pro-lapangan kerja dan pro-rakyat miskin".

Kegiatan Utama

	Peluncuran Panduan Pengusaha tentang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Jakarta, 8 Maret
	Serangkaian Forum Migrasi Kerja, Jakarta, 13, 20 and 27 Maret
	Aspirasi Kaum Muda: Menghadapi Tantangan Global Ketenagakerjaan Muda, Jakarta, 27 Maret
	Peluncuran Profil Pekerjaan yang Layak untuk Indonesia, Jakarta, 23 Mei
	Tahun Koperasi Internasional 2012: Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja melalui koperasi, Jakarta, 12 Juni
	Peluncuran Laporan Terbaru: "Memahami Pekerjaan yang Dilakukan oleh Anak dan Pekerja Muda: Kondisi Indonesia", Jakarta, 18 Juni
	Peluncuran Video Pekerja Anak Indonesia: Aku, Masa Depanmu Indonesia!, Jakarta, 28 Juni
	Konferensi Regional Green Jobs di Asia, Surabaya, 29 – 31 Agustus
	Peluncuran Kampanye ILO-SCORE, Jakarta dan Makassar, 1 dan 6 November
	Berbagi Pengalaman dalam Membangun dan Mengembangkan Kembali Aceh dan Nias, Jakarta, 13 November
	Lokakarya Regional mengenai Masyarakat Adat, Jakarta, 19 – 20 November
	Lokakarya mengenai Memajukan Perlindungan Sosial yang Peka terhadap HIV di Indonesia, Jakarta, 21 November
	Hari Hak Asasi Manusia 2012: Hak Anak untuk Terbebas dari Pekerja Anak, Jakarta, 10 Desember
	Konferensi Regional mengenai Perdagangan dan Ketenagakerjaan di Dunia yang Terglobalisasi, Jakarta, 10 – 11 Desember
	Penghargaan Media tentang Pekerja Anak dan Pendidikan, Jakarta, 15 Desember